ermai dwi

by Ermai Dwi

Submission date: 19-Jun-2026 12:08PM (UTC+0700)
Submission ID: 2985925528
File name: FISIP_1112200089_Ermai_Dwi_Wandasari.docx (1.33M)
Word count: 20660
Character count: 139568

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang terus menjadi tantangan pembangunan di Indonesia. Meski berbagai program pengentasan kemiskinan telah berjalan, fakta bahwa kemiskinan masih tinggi di wilayah dengan akses pembangunan yang tertinggal mengindikasikan adanya celah antara desain kebijakan dan realitas implementasi di lapangan (Kusumawati & Toshihiro Kudo, 2019). Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan utamanya bukan semata "ada atau tidaknya program", melainkan apakah program tersebut mampu memperbaiki akses masyarakat terhadap pekerjaan, layanan dasar, dan peluang ekonomi secara berkelanjutan (Imantria, 2024). Ketika peluang dan layanan tidak merata, bantuan bersifat sementara dan masyarakat tetap berada dalam kondisi rentan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program pengentasan kemiskinan perlu dikaji lebih lanjut, karena keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang dirumuskan dalam kebijakan, tetapi juga oleh pelaksanaannya di lapangan.

Kemiskinan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kondisi kekurangan pendapatan atau rendahnya tingkat konsumsi masyarakat (Nuryitmawan, 2016). Amartya Sen (1999) melalui karyanya *Development as Freedom* menegaskan bahwa kemiskinan merupakan bentuk ketidakbebasan yang membatasi individu untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Dalam konteks ini, persoalan kemiskinan masih tampak sebagai masalah sosial yang berkaitan erat dengan ketimpangan pembangunan antardaerah serta akses yang tidak merata terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan layak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya menghadirkan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat, sehingga kemiskinan tetap menjadi persoalan penting yang perlu dikaji, termasuk melalui pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan (Safitri et al., 2021).

Upaya memahami kondisi kemiskinan memerlukan indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara objektif. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) dalam mengukur tingkat kemiskinan. Pendekatan ini memandang kemiskinan sebagai kondisi ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan makanan maupun nonmakanan. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan. Garis kemiskinan tersebut terdiri atas Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang merepresentasikan kebutuhan minimum setara 2.100 kilokalori per kapita per hari serta Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM) yang mencakup kebutuhan dasar seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, kemiskinan dapat dipahami sebagai kondisi yang berkaitan erat dengan daya beli dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada Maret 2019,

jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 25,14 juta jiwa atau 9,41 persen, kemudian meningkat pada masa pandemi COVID-19 menjadi 27,55 juta jiwa atau 10,19 persen pada September 2020. Seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi nasional, angka kemiskinan menurun secara bertahap menjadi 26,50 juta jiwa atau 9,71 persen pada September 2021 dan kembali turun menjadi 25,90 juta jiwa atau 9,36 persen pada Maret 2023. Meskipun demikian, angka tersebut masih berada di atas capaian sebelum pandemi, sehingga menunjukkan bahwa kerentanan ekonomi masyarakat miskin masih cukup tinggi. Kondisi ini menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak hanya bergantung pada keberadaan program, tetapi juga pada bagaimana program tersebut dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan di lapangan.

Pemerintah Indonesia melalui sasaran pembangunan RKP 2024 pada periode akhir RPJMN 2020–2024 menargetkan tingkat kemiskinan nasional sebesar 6,5–7,5 persen. Namun, realisasi angka kemiskinan nasional pada Maret 2023 yang masih berada pada angka 9,36 persen menunjukkan bahwa target tersebut belum sepenuhnya tercapai. Kesenjangan antara target dan realisasi tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak hanya bergantung pada perumusan kebijakan, tetapi juga pada pelaksanaan program yang tepat di lapangan. Dengan demikian, implementasi program pengentasan kemiskinan menjadi hal yang penting untuk dikaji lebih lanjut.

Sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah menjalankan berbagai program perlindungan sosial, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dalam perkembangannya dioperasionalkan melalui Program Sembako. PKH memiliki landasan hukum utama dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Sementara itu, pelaksanaan bantuan sosial pangan secara non tunai memiliki dasar dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, dan pengaturan yang lebih operasional saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako. Dengan adanya landasan hukum tersebut, PKH dan BPNT/Program Sembako menjadi bagian dari instrumen kebijakan pemerintah dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat (Syahputra, 2024)

Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di berbagai daerah masih menghadapi berbagai persoalan dalam pelaksanaannya. Persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan ketepatan sasaran penerima bantuan, ketepatan informasi pencairan bantuan, serta pelaksanaan program di lapangan yang belum selalu berjalan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program pengentasan kemiskinan tidak hanya bergantung pada perumusan kebijakan, tetapi juga pada bagaimana program tersebut dilaksanakan di tingkat daerah dan desa.

Permasalahan kemiskinan juga menjadi isu penting di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Timur, kondisi kemiskinan di provinsi ini selama periode 2020–2025 menunjukkan tren yang fluktuatif, dengan tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan secara konsisten lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

persoalan kemiskinan di wilayah perdesaan masih memerlukan perhatian yang serius, termasuk melalui pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang menyentuh masyarakat secara langsung.

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020–2025

No	TAHUN	PERKOTAAN	PEDESAAN	JUMLAH
1	2020	8,37%	15,16%	11,46%
2	2021	7,99%	13,79%	10,59%
3	2022	7,78%	13,90%	10,49%
4	2023	7,50%	13,98%	10,35%
5	2024	7,12%	13,30%	9,79%
6	2025	7,00%	12,86%	9,50%

***Sumber** : Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Timur 2020-2025*

Tren penurunan tingkat kemiskinan di Jawa Timur dan Kabupaten Kediri menunjukkan adanya perbaikan pascapandemi. Periode 2020–2021 menjadi masa meningkatnya kemiskinan akibat dampak pandemi COVID-19, sedangkan sejak 2022 angka kemiskinan mulai menurun secara bertahap. Meskipun demikian, kenaikan garis kemiskinan menunjukkan bahwa biaya minimum untuk memenuhi kebutuhan hidup terus meningkat, sehingga masyarakat miskin dan rentan masih menghadapi tekanan ekonomi yang cukup besar. tekanan ekonomi yang cukup besar. Di sisi lain, tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan Jawa Timur secara konsisten lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan di perdesaan masih memerlukan perhatian yang serius, termasuk melalui pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang tepat di lapangan.

Permasalahan kemiskinan juga masih menjadi tantangan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Kediri. Meskipun berbagai kebijakan dan program telah dijalankan untuk menanggulangi kemiskinan, persoalan ini belum sepenuhnya dapat diatasi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kondisi kemiskinan di tingkat lokal menjadi penting, karena dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan serta berbagai persoalan yang masih dihadapi dalam mencapai tujuan pembangunan. Kondisi ini dapat terlihat lebih jelas melalui data berikut yang menunjukkan perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Kediri dari tahun 2020 hingga 2025,

Tabel 1.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kediri

No	TAHUN	GARIS KEMISKINAN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN	PRESENTASE PENDUDUK MISKIN
1	2020	324.215	179,93	11,40%
2	2021	335.990	184,49	11,64%
3	2022	353.033	169,46	10,65%
4	2023	385.874	171,18	10,72%
5	2024	403.621	159,27	9,95%
6	2025	419.486	157,47	9,81%

***Sumber** : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri 2020-2025*

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Kediri mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah penduduk miskin terjadi pada masa pandemi, sedangkan penurunan yang terjadi pascapandemi masih berfluktuasi. Selain itu, target penurunan kemiskinan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021–2026 belum sepenuhnya tercapai, yang menandakan bahwa pelaksanaan program pengentasan kemiskinan melalui PKH dan BPNT masih menghadapi tantangan di tingkat daerah. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Kediri juga dapat dilihat melalui Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Perkembangan nilai P1 dan P2 Kabupaten Kediri periode 2019–2023 disajikan pada tabel berikut

Tabel 1.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Kediri 2020-2025

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2020	1,55	0,33
2021	1,35	0,25
2022	1,67	0,41
2023	1,52	0,34
2024	1,22	0,24
2025	1,00	0,19

***Sumber** : BPS Kabupaten Kediri, Susenas 2003-2025*

Berdasarkan perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2), kondisi kemiskinan di Kabupaten Kediri masih rentan terhadap guncangan ekonomi. Fluktuasi indeks ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin tidak hanya hidup di bawah garis kemiskinan, tetapi juga menghadapi kesenjangan yang signifikan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, seperti PKH dan BPNT, secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lapangan.

Dalam rangka menanggulangi kemiskinan, pemerintah menjalankan berbagai program perlindungan sosial, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dalam perkembangannya dioperasionalkan melalui Program Sembako. PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, BPNT merupakan bantuan sosial pangan yang ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Dalam pelaksanaannya, bantuan ini tidak lagi sepenuhnya dibatasi pada mekanisme pembelian melalui e-warong, melainkan disalurkan melalui KKS atau rekening penerima, yang dalam praktik penyalurannya dapat melibatkan bank penyalur maupun PT Pos Indonesia sesuai dengan kondisi di lapangan. Kedua program tersebut memiliki peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan, sehingga pelaksanaannya di tingkat daerah dan desa, termasuk di Desa Dawuhan Kidul, perlu dikaji lebih lanjut untuk memahami bagaimana program diterapkan secara nyata di lapangan.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan program pengentasan kemiskinan melalui PKH dan BPNT di tingkat desa masih menghadapi berbagai persoalan. Berdasarkan temuan awal di lapangan, masih terdapat ketidakpastian informasi mengenai waktu pencairan bantuan, belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai proses penetapan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta adanya kecenderungan sebagian masyarakat yang menggantungkan pemenuhan kebutuhan hidup pada bantuan sosial. Selain itu, terdapat pula informasi awal mengenai pemanfaatan kartu bantuan yang diduga tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan program, seperti penggunaan kartu sebagai jaminan untuk meminjam uang kepada pihak lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program pengentasan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan penyaluran bantuan, tetapi juga menyangkut bagaimana program dipahami, dijalankan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat di tingkat lokal.

Fenomena yang lebih spesifik juga ditemukan di Desa Dawuhan Kidul. Berdasarkan observasi awal peneliti dan keterangan awal dari beberapa warga, ditemukan adanya ketidakkonsistenan dalam penandaan rumah tangga penerima manfaat melalui stiker bantuan sosial. Sebagian rumah penerima manfaat diketahui pernah ditempeli stiker, tetapi dalam perkembangannya stiker tersebut dilepas dengan berbagai alasan, seperti rumah dicat ulang atau stiker mengalami kerusakan. Di sisi lain, terdapat pula penerima manfaat yang menurut keterangan awal tidak pernah ditempeli stiker sejak awal menerima bantuan. Berdasarkan pengamatan awal

peneliti, rumah tangga penerima bantuan yang sudah menerima bansos sejak sebelum tahun 2024 cenderung lebih banyak memiliki atau pernah memiliki penanda tersebut, sedangkan sebagian penerima yang terdata pada tahun 2024 dan setelahnya justru tidak lagi menunjukkan penandaan yang serupa. Kondisi ini memperlihatkan bahwa implementasi program di tingkat desa belum sepenuhnya berjalan secara seragam, khususnya dalam aspek identifikasi dan penandaan penerima manfaat.

Selain itu, berdasarkan persepsi sebagian masyarakat, terdapat penerima manfaat yang pada awalnya memang berada pada kondisi ekonomi yang lebih terbatas saat pertama kali menerima bantuan, tetapi dalam perkembangannya dinilai telah mengalami perubahan kondisi sosial ekonomi, seperti perbaikan kondisi rumah tinggal dan penampilan ekonomi rumah tangga. Meskipun demikian, rumah tangga tersebut masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial.

Gambar 1.1 Dokumentasi observasi awal salah satu rumah penerima manfaat di Desa Dawuhan Kidul



***Sumber**: Dokumentasi peneliti, 2026*

Dokumentasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menilai secara langsung tingkat kesejahteraan rumah tangga penerima manfaat, melainkan sebagai gambaran observasi awal mengenai adanya perubahan kondisi fisik tempat tinggal pada sebagian penerima manfaat lama. Fenomena ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut karena dapat memunculkan pertanyaan mengenai pemutakhiran data, ketepatan sasaran, serta evaluasi pelaksanaan program bantuan sosial di tingkat desa.

Di sisi lain, terdapat pula penerima manfaat lain yang telah menerima bantuan dalam kurun waktu lama, tetapi kondisi tempat tinggal dan situasi ekonominya relatif tidak banyak berubah. Variasi kondisi tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga penerima manfaat memiliki dinamika sosial ekonomi yang berbeda-beda, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai ketepatan sasaran, pemutakhiran data penerima, dan pelaksanaan evaluasi program di tingkat desa. Fenomena ini penting dikaji karena dapat menimbulkan beragam persepsi di tengah masyarakat terhadap keadilan dan ketepatan pelaksanaan program bantuan sosial.

Dengan demikian, pelaksanaan PKH dan BPNT di Desa Dawuhan Kidul tidak hanya perlu dilihat dari tersalurkannya bantuan kepada masyarakat, tetapi juga dari bagaimana program tersebut dijalankan, dikomunikasikan, dipahami, serta dievaluasi sesuai dengan kondisi sosial ekonomi penerima manfaat. Di Kabupaten Kediri, yang memiliki proporsi pekerja pertanian cukup besar dan mayoritas penduduk bekerja di sektor informal, pelaksanaan program di tingkat desa menjadi semakin penting untuk dikaji. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi program

pengentasan kemiskinan melalui PKH dan BPNT di Desa Dawuhan Kidul perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai realitas pelaksanaan program, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya di tingkat lokal.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam konteks pengentasan kemiskinan. Studi Fanny dan Megawati (2022), misalnya, menganalisis pelaksanaan BPNT di Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, menggunakan kerangka Van Meter dan Van Horn yang mencakup standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan adanya kendala pada aspek teknis tertentu dalam pelaksanaan program di lapangan. Namun demikian, sebagian kajian yang ada cenderung menitikberatkan pada pemetaan faktor pelaksanaan dan kelancaran proses program, sementara studi yang secara spesifik mengaitkan implementasi BPNT dan PKH dengan pengentasan kemiskinan pada konteks lokal, terutama di Kabupaten Kediri, masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn untuk menganalisis pelaksanaan program pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Kediri. Model ini menekankan enam variabel utama, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Melalui kerangka tersebut, penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana pelaksanaan program berlangsung di tingkat lapangan serta berbagai kondisi yang menyertai implementasinya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai implementasi program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kediri, khususnya di Desa Dawuhan Kidul, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian administrasi publik dan menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan program bantuan sosial.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul, Kabupaten Kediri?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis implementasi program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul, Kabupaten Kediri.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu administrasi publik, khususnya mengenai implementasi program pengentasan kemiskinan di tingkat desa.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dan pihak terkait dalam meningkatkan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Objek Penelitian

Kabupaten Kediri merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Timur yang terdiri atas sejumlah kecamatan dan desa. Salah satu kecamatan di wilayah tersebut adalah Kecamatan Papar. Berdasarkan data Kecamatan Papar Dalam Angka 2025, Kecamatan Papar terdiri atas 20 desa yang seluruhnya termasuk dalam kategori wilayah perdesaan. Kecamatan ini juga memiliki 315 RT, 79 RW, dan 63 dusun sebagai bagian dari struktur administrasi kewilayahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Papar memiliki cakupan pemerintahan desa yang cukup luas dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan masyarakat.



Gambar 4.1 Peta Kecamatan Papar

Sumber: *Google Maps, Kantor Desa Dawuhan Kidul, diakses pada 14 Mei 2026.*

Lokasi penelitian ini adalah Desa Dawuhan Kidul, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Desa ini dipilih karena memiliki karakteristik sosial-ekonomi masyarakat yang relevan dengan fokus penelitian mengenai implementasi program pengentasan kemiskinan di tingkat desa. Dalam konteks penelitian ini, Desa Dawuhan Kidul tidak hanya dipahami sebagai lokasi administratif, tetapi juga sebagai ruang pelaksanaan kebijakan sosial yang melibatkan pemerintah desa, pendamping program, operator layanan, serta keluarga penerima manfaat.

Desa Dawuhan Kidul memiliki luas wilayah sekitar 2,64 km² atau sekitar 6,53% dari luas Kecamatan Papar. Jarak Desa Dawuhan Kidul ke pusat pemerintahan Kecamatan Papar sekitar 3 km, sedangkan jarak menuju pusat

pemerintahan Kabupaten Kediri sekitar 17 km. Secara topografis, Desa Dawuhan Kidul termasuk wilayah dataran dan berada di luar kawasan hutan. Kondisi geografis tersebut menunjukkan bahwa desa ini memiliki akses wilayah yang relatif terhubung dengan pusat pemerintahan kecamatan maupun kabupaten, meskipun dinamika sosial-ekonominya tetap menunjukkan karakter perdesaan.

Secara administratif, Desa Dawuhan Kidul terdiri atas 3 dusun, 3 RW, dan 14 RT. Adapun batas wilayah Desa Dawuhan Kidul yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Janti dan Desa Nanggungan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pehwetan dan Desa Pehulon, sebelah timur berbatasan dengan Desa Nanggungan, serta sebelah barat berbatasan dengan Desa Janti. Letak wilayah tersebut menunjukkan bahwa Desa Dawuhan Kidul memiliki hubungan sosial dan ekonomi dengan desa-desa di sekitarnya, terutama dalam aktivitas pertanian, perdagangan kecil, dan mobilitas masyarakat.

Berdasarkan data desa, Desa Dawuhan Kidul memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.299 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.194 KK. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Desa Dawuhan Kidul memiliki basis penduduk yang cukup besar untuk ukuran desa, sehingga pelaksanaan program pengentasan kemiskinan membutuhkan proses pendataan, verifikasi, dan pelayanan sosial yang tertib. Dalam konteks implementasi kebijakan, jumlah penduduk dan kepala keluarga menjadi penting karena berhubungan langsung dengan cakupan sasaran program, kapasitas pelayanan pemerintah desa, serta ketepatan penentuan keluarga penerima manfaat.

Dilihat dari struktur mata pencaharian, pekerjaan masyarakat Desa Dawuhan Kidul didominasi oleh sektor pertanian. Sebagian masyarakat bekerja sebagai petani, buruh tani, pedagang kecil, pemilik warung, serta pekerja informal lainnya. Dominasi sektor pertanian dan pekerjaan informal menunjukkan bahwa sebagian pendapatan rumah tangga masyarakat bergantung pada kondisi musim, hasil panen, ketersediaan pekerjaan harian, dan fluktuasi ekonomi lokal. Kondisi ini menjadi salah satu faktor penting dalam memahami kerentanan ekonomi masyarakat desa.

Dari aspek pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat Desa Dawuhan Kidul terdiri atas penduduk belum tamat/SD sebanyak 320 orang, SLTP sebanyak 666 orang, SLTA sebanyak 833 orang, D1/D2 sebanyak 11 orang, D3 sebanyak 39 orang, S1 sebanyak 132 orang, dan S2 sebanyak 7 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat masih didominasi oleh jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kondisi pendidikan ini dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap pekerjaan formal, kemampuan memahami prosedur administratif bantuan sosial, serta partisipasi dalam program pemberdayaan ekonomi.

Pada bidang sosial, Desa Dawuhan Kidul memiliki fasilitas pendidikan berupa 1 sekolah dasar. Sementara itu, pada bidang kesehatan tersedia 4 bidan dan 6 tenaga kesehatan lainnya. Kegiatan ekonomi masyarakat juga didukung oleh keberadaan 35 toko atau warung kelontong serta beberapa industri kecil, seperti

industri furnitur kayu, industri barang logam bukan mesin, dan industri makanan. Keberadaan fasilitas dan aktivitas ekonomi tersebut menunjukkan bahwa Desa Dawuhan Kidul memiliki sumber daya lokal, tetapi kegiatan ekonominya masih banyak ditopang oleh sektor kecil, informal, dan berbasis rumah tangga.

Dalam konteks sosial-ekonomi tersebut, program pengentasan kemiskinan menjadi bagian penting dari kebijakan perlindungan sosial di Desa Dawuhan Kidul. Program yang menjadi fokus penelitian ini meliputi Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Ketiga program tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi sumber kebijakan, mekanisme pelaksanaan, maupun sasaran penerima manfaat. PKH dan BPNT merupakan program bantuan sosial yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat, sedangkan BLT Dana Desa berkaitan dengan penggunaan Dana Desa dan mekanisme pemerintahan desa.

Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul tidak hanya berkaitan dengan penyaluran bantuan kepada masyarakat. Pelaksanaan program juga mencakup proses pendataan, pembaruan data, verifikasi penerima manfaat, koordinasi antara pemerintah desa dan pendamping sosial, penyampaian informasi kepada masyarakat, serta penanganan keluhan warga. Oleh karena itu, Desa Dawuhan Kidul menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji implementasi program pengentasan kemiskinan dengan menggunakan perspektif implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.

4.1.2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan temuan lapangan terkait implementasi program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Program yang menjadi fokus utama penelitian ini meliputi Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non-Tunai, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selain ketiga program tersebut, penelitian ini juga menemukan beberapa bentuk bantuan sosial lain yang diterima masyarakat, seperti bantuan beras/sembako, Program Indonesia Pintar, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sejauh bantuan tersebut berkaitan dengan upaya perlindungan sosial dan pengurangan beban ekonomi rumah tangga miskin.

Data dalam bagian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Keluarga Penerima Manfaat, Kasi Kesra, operator pelayanan, Kepala Desa, dan pendamping sosial. KPM digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman penerima bantuan dalam memahami, menerima, dan memanfaatkan program. Sementara itu, Kasi Kesra, operator pelayanan, dan pendamping sosial digunakan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pendataan, pengelolaan data, penyaluran bantuan, koordinasi antar pelaksana, serta kendala dalam pelaksanaan program di lapangan.

Data sekunder digunakan untuk melengkapi temuan lapangan, terutama data kependudukan desa, data tingkat pendidikan, data pekerjaan masyarakat, data

desil kesejahteraan, serta dokumen atau arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan sosial. Data sekunder tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran objektif mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat Desa Dawuhan Kidul dan untuk melihat kesesuaian antara sasaran program dengan kondisi masyarakat yang menjadi penerima maupun calon penerima bantuan.

Penyajian data disusun berdasarkan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksanaan, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Pada bagian ini, data disajikan secara deskriptif sebagai dasar untuk pembahasan pada subbab berikutnya. Analisis teoritis secara lebih mendalam dilakukan pada bagian pembahasan, sehingga penyajian data difokuskan pada penggambaran fakta lapangan, keterangan informan, dan dokumen pendukung yang relevan.

Berdasarkan data lapangan, bantuan sosial yang diterima masyarakat Desa Dawuhan Kidul tidak hanya terbatas pada satu jenis program. KPM yang diwawancarai menerima beberapa bentuk bantuan, seperti PKH, BPNT, bantuan beras/sembako, PIP, dan PBI-JK. Sementara itu, BLT Dana Desa dan BSPS diketahui pernah berjalan di Desa Dawuhan Kidul, tetapi tidak lagi menjadi program yang aktif atau dominan pada saat penelitian dilakukan. Berdasarkan informasi dari perangkat desa, BLT Dana Desa terakhir berjalan pada Maret 2025 dengan mekanisme penentuan penerima melalui musyawarah desa. Namun, mekanisme penentuan bantuan sosial saat ini lebih banyak mengacu pada data DTSEN dan aplikasi Cek Bansos.

Tabel 4.1 Status Program Bantuan Sosial di Desa Dawuhan Kidul

No.	Program Bantuan	Status Saat Penelitian	Mekanisme Pelaksanaan	Posisi dalam Penelitian
1	Program Keluarga Harapan	Masih berjalan	Pendamping sosial, pertemuan KPM, KKS/ATM	Program utama
2	Bantuan Pangan Non-Tunai	Masih berjalan	Pencairan melalui KKS/ATM, informasi dari pendamping sosial	Program utama
3	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	Terakhir berjalan Maret 2025	Pernah melalui musyawarah desa	Program fokus awal, tetapi tidak lagi dominan saat penelitian
4	Bantuan beras/ sembako	Masih ditemukan di lapangan	Undangan melalui RT, penyaluran di kantor desa	Temuan pendukung

5	Program Indonesia Pintar	Diterima oleh anak KPM tertentu	Berkaitan dengan kebutuhan pendidikan anak	Temuan pendukung
6	PBI-JK	Diterima oleh KPM tertentu	Bantuan iuran jaminan kesehatan	Temuan pendukung
7	Bantuan permakanan	Pernah ditemukan/berjalan sebelumnya	Melalui penyaluran oleh pendamping sosial	Temuan pendukung
8	BSPS	Pernah berjalan sebelumnya	Pengusulan via Pemdes	Temuan pendukung
1	Program Keluarga Harapan	Masih berjalan	Pendamping sosial, pertemuan KPM, KKS/ATM	Program utama

Sumber: *Hasil wawancara dan dokumentasi penelitian, 2026.*

Berdasarkan tabel 4.1, program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul tidak hanya berbentuk bantuan tunai, tetapi juga mencakup bantuan pangan, pendidikan, kesehatan, dan dukungan sosial lainnya. PKH dan BPNT menjadi program utama yang masih berjalan dan banyak dirasakan oleh KPM. BLT Dana Desa tetap dicatat sebagai bagian dari fokus penelitian karena pernah berjalan di Desa Dawuhan Kidul, tetapi pada saat penelitian dilakukan program tersebut tidak lagi menjadi bantuan yang aktif atau dominan. Sementara itu, bantuan beras/sembako, PIP, PBI-JK, bantuan permakanan, dan BSPS ditempatkan sebagai temuan pendukung karena muncul dalam keterangan informan dan berkaitan dengan upaya pengurangan beban ekonomi rumah tangga miskin.

Dengan demikian, penyajian data dalam penelitian ini tidak hanya menggambarkan jenis bantuan yang diterima masyarakat, tetapi juga menjelaskan bagaimana program tersebut dilaksanakan, siapa saja aktor yang terlibat, bagaimana mekanisme informasi dan penyalurannya, serta kendala yang muncul dalam pelaksanaan program. Uraian tersebut disajikan melalui enam indikator implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn sebagai berikut.

1. Standar dan Tujuan Kebijakan:

Standar dan tujuan kebijakan merupakan salah satu indikator penting dalam melihat implementasi program pengentasan kemiskinan. Menurut Van Meter dan Van Horn, standar dan tujuan kebijakan berkaitan dengan arah program, sasaran yang dituju, serta kelompok masyarakat yang menjadi penerima manfaat. Kejelasan standar dan tujuan diperlukan agar pelaksana program memiliki pemahaman yang sama mengenai sasaran bantuan, mekanisme pelaksanaan, serta hasil yang ingin dicapai melalui program tersebut.

Dalam penelitian ini, program pengentasan kemiskinan yang menjadi fokus meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai

(BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa). Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Dawuhan Kidul juga menerima berbagai bantuan sosial lainnya, seperti bantuan pangan berupa beras atau sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), Bantuan Permakanan, serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Meskipun memiliki bentuk dan mekanisme yang berbeda, berbagai bantuan tersebut pada dasarnya ditujukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama di bidang pangan, pendidikan, kesehatan, dan perbaikan kondisi sosial ekonomi keluarga.

Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul mengacu pada berbagai regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan bantuan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial bersyarat yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin, sedangkan BPNT atau Program Sembako diarahkan untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Pada saat penelitian dilakukan, penetapan sasaran penerima bantuan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa, operator pelayanan, dan pendamping sosial, proses penentuan penerima bantuan saat ini lebih banyak mengacu pada data DTSEN, sedangkan pemerintah desa berperan dalam membantu proses verifikasi, pemutakhiran data, serta pelayanan kepada masyarakat terkait bantuan sosial.

Keberadaan berbagai program bantuan sosial tersebut juga disampaikan oleh Kepala Desa Dawuhan Kidul. Menurut beliau, masyarakat menerima beberapa jenis bantuan yang berbeda sesuai dengan kondisi dan kriteria yang ditetapkan pemerintah. Beliau menyampaikan:

> "Bantuannya yang masih ada itu bantuan sembako, seperti beras dan minyak. Selain itu ada PKH, BPNT, BLT Dana Desa, dan tahun kemarin kalau tidak salah juga masih ada BSPS sekitar 20 juta untuk bantuan rumah." (Wawancara 14 Mei 2026)

Berdasarkan keterangan tersebut, program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul dilaksanakan melalui berbagai bentuk bantuan sosial dengan sasaran dan mekanisme yang berbeda. Bantuan yang diberikan tidak hanya berupa bantuan pangan dan bantuan tunai, tetapi juga mencakup bantuan pendidikan, kesehatan, serta perbaikan rumah. Keberagaman program tersebut menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di desa tidak dilakukan melalui satu intervensi saja, melainkan melalui berbagai bentuk bantuan yang diarahkan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat dan membantu pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Berdasarkan data Desa Dawuhan Kidul, kondisi kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari kategori desil. Data desil ini menjadi penting karena berkaitan

langsung dengan sasaran kebijakan program pengentasan kemiskinan. Rumah tangga yang masuk dalam desil rendah menunjukkan kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan lebih rendah dan berpotensi menjadi sasaran program bantuan sosial.

Tabel 4.2 Data Desil Kesejahteraan Masyarakat Desa Dawuhan Kidul

No.	Kategori Desil	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Keterangan
1	**Desil 1**	126 KK	418 jiwa	Kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah
2	**Desil 2**	185 KK	534 jiwa	Kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan rendah
3	**Desil 3**	145 KK	421 jiwa	Kelompok rumah tangga rentan secara sosial-ekonomi
4	Desil 4	142 KK	365 jiwa	Kelompok rumah tangga rentan miskin
5	Desil 5	108 KK	303 jiwa	Kelompok rumah tangga pas – pas anatau menengah bawah
6	Desil 6 - 10	459 KK	1.221 jiwa	Kelompok rumah tangga menengah ke atas atau mandiri
Jumlah	**Desil 1-3**	**459 KK**	**1.373 jiwa**	**Kelompok sasaran potensial program pengentasan kemiskinan**

Sumber: *Data Desa Dawuhan Kidul, 2026*

Berdasarkan tabel 4.2 tersebut, terdapat 459 KK atau 1.373 jiwa di Desa Dawuhan Kidul yang masuk dalam Desil 1 sampai Desil 3. Data ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah dan rentan secara ekonomi. Oleh karena itu, data desil menjadi salah satu dasar penting dalam melihat kesesuaian antara sasaran program dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Pemahaman mengenai tujuan bantuan sosial juga terlihat dari pengalaman penerima manfaat. Bu Wiwit, salah satu KPM penerima PKH dan BPNT, menjelaskan bahwa BPNT dipahami sebagai bantuan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sedangkan PKH lebih banyak digunakan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya. Menurutnya, bantuan yang diterima memang membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Namun, manfaat bantuan belum dapat

dirasakan secara optimal karena pencairannya sering dilakukan secara rapel dan tidak selalu tepat waktu. Beliau menyampaikan:

> "BPNT itu untuk membeli bahan pangan karena bantuan pangan dari pemerintah. Sekarang dicairkan berupa uang tunai di rekening masing-masing KPM. Kalau PKH biasanya untuk kebutuhan rumah tangga lain. Tapi karena kebutuhan ekonomi mendesak dan bantuannya cair rapel, saya kadang terpaksa utang dulu ke tetangga. Kalau sudah cair, uangnya dipakai untuk menutup utang." (Wawancara 7 Mei 2026)

Berdasarkan keterangan tersebut, bantuan sosial telah memberikan manfaat dalam membantu pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Akan tetapi, keterlambatan pencairan menyebabkan bantuan belum selalu dapat digunakan pada saat kebutuhan mendesak muncul. Bu Wiwit juga menjelaskan bahwa bantuan beras yang diterima masih membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga, meskipun jumlahnya belum sepenuhnya mencukupi karena jumlah anggota keluarga yang cukup banyak dan kondisi ekonomi rumah tangga yang terbatas.

Pandangan yang hampir sama disampaikan oleh Bu Karina. Sebagai penerima PKH, BPNT, PBI-JK, bantuan pangan, dan PIP untuk anaknya, ia memanfaatkan bantuan tersebut untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar keluarga, seperti pembayaran listrik, kebutuhan pendidikan anak, cicilan, serta kebutuhan dapur sehari-hari. Beliau menjelaskan:

> "Bantuan PKH dan BPNT biasanya saya gunakan untuk membayar listrik, membayar cicilan, uang sekolah anak, dan sisanya untuk membeli kebutuhan dapur sehari-hari. Kalau beras 20 kg itu sangat membantu karena pengeluaran beras termasuk yang paling besar." (Wawancara 3 Mei 2026)

Meskipun bantuan yang diterima memberikan manfaat bagi keluarga, Bu Karina menilai bahwa pola pencairan yang dilakukan secara rapel sering kali membuat bantuan tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan waktu kebutuhan. Beliau menyampaikan:

> "Bantuannya memang membantu, tapi sayangnya ya karena cairnya dirapel, bukan setiap bulan. Kadang harus nunggu tiga bulan atau lebih." (Wawancara 3 Mei 2026)

Pengalaman Bu Karina menunjukkan bahwa tujuan program dalam membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga telah dirasakan oleh penerima manfaat. Namun demikian, ketidakpastian waktu pencairan masih menjadi kendala yang memengaruhi efektivitas pemanfaatan bantuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga secara berkelanjutan.

Bu Kosmiati juga menyampaikan bahwa bantuan PKH, BPNT, bantuan beras, dan PIP digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Menurutnya, bantuan tersebut memberikan manfaat terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan dan pendidikan anak. Beliau menyampaikan:

> "Bantuan biasanya saya gunakan untuk membeli stok beras, kebutuhan sekolah anak, dan kebutuhan rumah. Sebelum menerima bantuan, uang untuk membeli beras dan kebutuhan rumah sangat terbatas karena suami kerja serabutan. Setelah menerima bantuan, beban keluarga lebih ringan." (Wawancara pada 4 Mei 2026)

Pengalaman Bu Kosmiati menunjukkan bahwa bantuan sosial tidak hanya dipandang sebagai tambahan pendapatan, tetapi juga sebagai bentuk dukungan yang membantu keluarga memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Manfaat bantuan dirasakan dalam bentuk berkurangnya beban pengeluaran rumah tangga, terutama untuk kebutuhan pangan dan pendidikan anak. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan program dalam membantu masyarakat miskin dan rentan telah dirasakan secara langsung oleh penerima manfaat.

Dari sisi pelaksana, Pak Sodik selaku Kasi Kesra menjelaskan bahwa bantuan sosial yang diterima masyarakat Desa Dawuhan Kidul terdiri atas berbagai jenis program, seperti PKH, BPNT, bantuan pangan, serta beberapa bantuan lain yang pernah berjalan. Menurutnya, mekanisme penentuan penerima bantuan saat ini lebih banyak mengacu pada sistem data sosial yang terintegrasi, sedangkan pemerintah desa berperan dalam membantu pendataan, memberikan informasi, dan melayani masyarakat yang membutuhkan pendampingan terkait bantuan sosial. Beliau menjelaskan:

> "Kalau untuk prosedur administrasi biasanya pengecekan data ada di database DTSEN, itu bagian operator pelayanan. Kalau bagian mendata masyarakat atau survei langsung ke masyarakat itu bagian Kasi Kesra. Sekarang warga banyak yang kurang tahu tentang pengajuan bantuan sosial, padahal sekarang bisa melalui aplikasi Cek Bansos. Desa hanya mengarahkan jika ada warga yang datang." (Wawancara pada 12 Mei 2026)

Berdasarkan keterangan tersebut, penentuan sasaran bantuan sosial saat ini tidak lagi sepenuhnya bergantung pada penilaian langsung pemerintah desa, tetapi lebih banyak mengacu pada data yang telah terintegrasi dalam sistem DTSEN. Dalam kondisi ini, pemerintah desa berperan sebagai fasilitator yang membantu proses pendataan, verifikasi, dan pelayanan kepada masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa standar sasaran program semakin mengarah pada penggunaan data sosial sebagai dasar penentuan penerima bantuan, sehingga peran desa lebih difokuskan pada mendukung kelancaran pelaksanaan program di tingkat lokal.

Operator pelayanan juga menjelaskan bahwa data bantuan sosial saat ini sudah terintegrasi dalam sistem DTSEN dan dapat dicek melalui aplikasi Cek Bansos. Menurut operator, kelompok yang masuk dalam desil rendah memiliki peluang lebih besar untuk menerima bantuan sosial apabila memenuhi ketentuan program. Beliau menyampaikan:

> "Kalau hubungannya dengan bantuan sosial, sekarang semuanya sudah terintegrasi menjadi satu di DTSEN. Biasanya yang mendapat bansos tergantung desil. Desil 1, 2, 3, dan 4 bisa mendapatkan beberapa bantuan sosial, tetapi tetap ada syaratnya. Kalau sudah dapat PKH, tidak bisa dapat BLT Dana Desa." (Wawancara 12 Mei 2026)

Berdasarkan keterangan operator pelayanan, penentuan penerima bantuan sosial saat ini tidak hanya mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga mengacu pada kategori desil dan ketentuan masing-masing program bantuan. Selain itu, terdapat aturan tertentu yang membatasi penerimaan bantuan secara bersamaan, sehingga tidak semua warga yang terdaftar dalam DTSEN dapat menerima seluruh jenis bantuan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penetapan penerima bantuan dilakukan berdasarkan data sosial yang telah terintegrasi dan ketentuan program yang berlaku.

Temuan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 yang menempatkan DTSEN sebagai acuan dalam penetapan sasaran berbagai program kesejahteraan sosial. Dengan adanya proses usulan, verifikasi, dan validasi data, penerima bantuan diharapkan lebih sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Keterangan mengenai BLT Dana Desa juga memperlihatkan adanya perubahan mekanisme dalam penentuan sasaran bantuan. Berdasarkan informasi dari operator pelayanan dan Kasi Kesra, BLT Dana Desa terakhir berjalan pada Maret 2025. Penerimanya merupakan masyarakat Desa Dawuhan Kidul yang dipilih melalui musyawarah desa. Namun, pada saat penelitian dilakukan, BLT Dana Desa tidak lagi menjadi program yang aktif atau dominan. Berdasarkan informasi dari operator pelayanan dan Kasi Kesra, BLT Dana Desa terakhir disalurkan pada tahun 2025 melalui mekanisme musyawarah desa. Namun, pada saat penelitian dilakukan program tersebut sudah tidak menjadi program bantuan yang dominan. Penentuan sasaran bantuan sosial yang berjalan saat ini lebih banyak mengacu pada DTSEN dan hasil pemutakhiran data sosial yang tersedia dalam sistem.

Pendamping sosial menjelaskan bahwa tujuan utama PKH dan BPNT adalah membantu pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin. Menurutnya, bantuan tersebut diarahkan terutama pada kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, lansia, dan penyandang disabilitas. Beliau menyampaikan:

> “Kalau PKH dan BPNT itu tujuannya membantu kebutuhan dasar KPM, terutama untuk kebutuhan dapur dan sekolah anak. Tapi pendamping juga punya tugas membina KPM lewat pertemuan bulanan, supaya tidak terus bergantung pada bantuan dan bisa graduasi.” (Wawancara pada 18 Mei 2026)

Pendamping sosial juga menjelaskan bahwa di Desa Dawuhan Kidul terdapat 170 KPM. Besaran bantuan PKH berbeda-beda sesuai komponen penerima, seperti ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas. BPNT diterima sebesar Rp. 600.000 per tiga bulan. Keterangan ini menunjukkan bahwa standar bantuan PKH dan BPNT memiliki dasar kategori tertentu, terutama berdasarkan komponen keluarga dan kebutuhan dasar penerima manfaat. Namun, pendamping sosial juga menyampaikan bahwa ketepatan sasaran masih menjadi persoalan di lapangan. Menurutnya, masih terdapat warga yang secara ekonomi sudah mampu, tetapi tetap menerima bantuan dan tidak bersedia mengundurkan diri dari kepesertaan bantuan sosial. Beliau menyampaikan:

> “Di lapangan masih ada warga yang secara ekonomi sudah mampu, tetapi tetap bersikeras tidak mau mundur dari bantuan sosial. Padahal mereka sebenarnya tahu kondisinya sudah lebih baik. Di sisi lain, ada juga warga yang merasa layak menerima bantuan tetapi belum masuk daftar.” (Wawancara 18 Mei 2026)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan DTSEN dan kategori desil belum sepenuhnya mampu menghilangkan permasalahan ketepatan sasaran. Perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang terjadi lebih cepat dibandingkan proses pemutakhiran data menyebabkan masih ditemukan ketidaksesuaian antara data penerima bantuan dan kondisi riil di lapangan..

Pandangan mengenai standar dan tujuan kebijakan juga disampaikan oleh Kepala Desa Dawuhan Kidul. Menurut beliau, program seperti PKH, BPNT, dan BLT Dana Desa pada dasarnya memiliki tujuan yang jelas, yaitu membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar serta mengurangi beban ekonomi rumah tangga. Beliau menyampaikan:

> “Kalau menurut saya, tujuan program-program seperti PKH, BPNT, dan BLT Dana Desa itu sudah baik sekali. Intinya kan memang untuk meringankan beban warga yang kurang mampu, supaya kebutuhan pokoknya tetap bisa terbantu. Di desa, yang kita lihat bukan cuma soal angka-angka, tapi bagaimana warga bisa makan, sekolah anaknya jalan, kesehatan terjaga, dan hidupnya tidak terlalu berat. Jadi saya menilai tujuan program itu sangat membantu masyarakat kecil, asal memang betul-betul sampai ke orang yang berhak.” (Wawancara 15 Mei 2026)

Selain menilai bahwa tujuan program sudah tepat, Kepala Desa juga menyampaikan bahwa pelaksanaan bantuan sosial masih menghadapi persoalan ketepatan sasaran. Menurut beliau, masih terdapat perbedaan antara kondisi ekonomi masyarakat di lapangan dengan data penerima bantuan yang tercatat dalam sistem. Beliau menjelaskan:

> "Secara umum sudah berjalan, tapi memang belum bisa dibilang sempurna. Ada yang sudah tepat sasaran, ada juga yang masih sering jadi bahan pertanyaan warga. Kadang masyarakat merasa kondisi ekonominya sudah berubah, tapi masih tercatat menerima bantuan. Ada juga yang seharusnya layak menerima, tapi belum masuk data. Nah, di situlah memang masih perlu pembenahan data dan pendampingan supaya tujuan program benar-benar kena ke sasaran yang tepat." (Wawancara 15 Mei 2026l)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa memahami program pengentasan kemiskinan sebagai bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Namun, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kejelasan tujuan kebijakan, tetapi juga oleh ketepatan sasaran penerima bantuan. Oleh karena itu, pemutakhiran data dan pendampingan kepada masyarakat masih menjadi aspek penting dalam pelaksanaan program di tingkat desa.

Berdasarkan hasil penelitian, standar dan tujuan program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul pada dasarnya telah memiliki arah yang jelas, baik melalui PKH, BPNT, bantuan pangan, maupun program bantuan sosial lainnya. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait ketepatan data penerima bantuan dan kepastian waktu pencairan. Selain itu, sebagian penerima manfaat masih memandang bantuan sosial sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga tujuan jangka panjang program dalam mendorong kemandirian dan peningkatan kesejahteraan belum sepenuhnya dipahami. Dengan demikian, pada indikator standar dan tujuan kebijakan, implementasi program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul dapat dikatakan telah memiliki sasaran dan tujuan yang jelas, tetapi masih memerlukan perbaikan pada aspek ketepatan sasaran dan pelaksanaan program di lapangan.

2. Sumber Daya

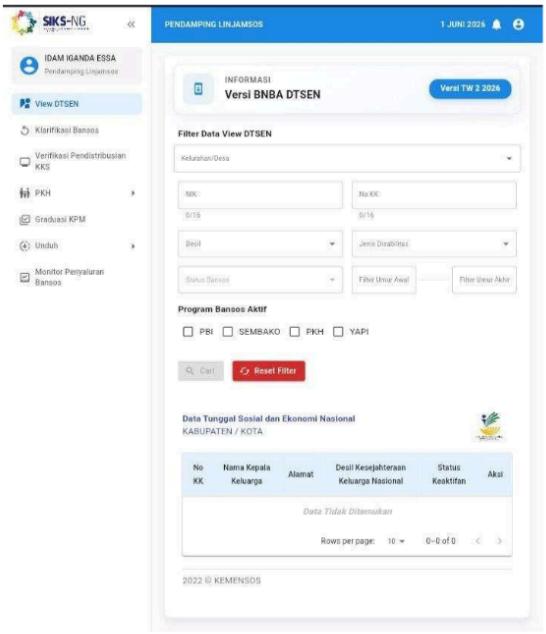
Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi program pengentasan kemiskinan. Menurut Van Meter dan Van Horn, sumber daya tidak hanya mencakup anggaran, tetapi juga sumber daya manusia, informasi, kewenangan, sarana administratif, serta berbagai sistem pendukung yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan. Keberadaan sumber daya yang memadai menjadi pendukung penting dalam pelaksanaan program, mulai dari

proses pendataan, penetapan sasaran, penyaluran bantuan, hingga pendampingan kepada masyarakat penerima manfaat.

Dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul, sumber daya yang terlibat meliputi perangkat desa, Kasi Kesra, operator pelayanan, pendamping sosial, RT, kepala dusun, serta sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan data bantuan sosial.

Salah satu sumber daya informasi yang digunakan adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dapat diakses melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Sistem tersebut memuat data sosial ekonomi masyarakat yang digunakan sebagai dasar dalam proses pendataan, verifikasi, dan pendampingan penerima bantuan sosial.

Gambar 4.2 Tampilan Data DTSEN pada Sistem SIKS-NG Pendamping Sosial



Sumber: *Data Penelitian, 2026*

Gambar 4.2 menunjukkan tampilan data DTSEN yang dapat diakses oleh pendamping sosial melalui SIKS-NG. Melalui sistem tersebut, pendamping sosial dapat memperoleh informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang digunakan sebagai dasar dalam proses pendampingan, pemantauan, serta verifikasi penerima bantuan sosial.

Ketersediaan data dan sistem informasi tersebut menjadi salah satu sumber daya pendukung dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Namun, keberhasilan pelaksanaan program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan data, tetapi juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pelayanan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Terkait sumber daya manusia, Kepala Desa Dawuhan Kidul menjelaskan bahwa jumlah pelaksana yang terlibat dalam penyaluran bantuan pada dasarnya sudah tersedia, tetapi masih menghadapi keterbatasan ketika jumlah penerima bantuan yang dilayani cukup banyak. Beliau menyampaikan:

> "Kalau pas penyaluran bantuan di kantor desa, tenaganya kurang. Antriannya banyak, sampai ada warga protes kok lama banget. Perangkat desa ada Kasi Kesra, Kasun, dan staf, tapi kerjaan mereka banyak, warga juga banyak." (Wawancara 14 Mei 2026)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program, terutama pada saat penyaluran bantuan dilakukan secara bersamaan kepada banyak penerima manfaat. Jumlah petugas yang terbatas dibandingkan dengan jumlah penerima bantuan menyebabkan antrean panjang dan memperlambat proses pelayanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan pelaksana program yang memadai tidak hanya penting untuk administrasi bantuan, tetapi juga berpengaruh terhadap kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

Gambar 4.3 Antrean Penyaluran Bantuan Pangan di Kantor Desa Dawuhan Kidul



Sumber: *Dokumentasi Peneliti, 2026*

Selain sumber daya manusia, pelaksanaan program pengentasan kemiskinan juga didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam proses pelayanan bantuan sosial. Informasi mengenai data penerima maupun jadwal penyaluran menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat dan pelaksana program karena berkaitan langsung dengan proses pencairan bantuan. Kepala Desa juga menyampaikan bahwa kendala paling terasa ada pada data dan informasi:

> "Yang paling repot itu soal data sama kabar bantuan. Warga sering tanya ke desa, tapi data kadang belum berubah. Jadwal pencairan juga tidak tentu, jadi warga bingung dan bolak-balik tanya, padahal dari desa sendiri juga tidak tau pastinya karena nunggu info dari atas." (Wawancara 14 Mei 2026)

Berdasarkan keterangan tersebut, informasi mengenai bantuan sosial sebenarnya telah disalurkan melalui pendamping sosial maupun ketua kelompok KPM. Namun, informasi yang diterima masyarakat umumnya masih terbatas pada perkiraan waktu pencairan dan belum selalu disertai kepastian jadwal. Kondisi ini menyebabkan sebagian penerima manfaat memilih untuk mengecek rekening atau ATM secara mandiri guna memastikan bantuan telah dicairkan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan informasi sudah cukup membantu masyarakat, tetapi kepastian informasi pencairan masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program

Dari sisi penerima manfaat, sumber daya yang dirasakan tidak hanya berkaitan dengan kemudahan pencairan bantuan, tetapi juga kemudahan memperoleh informasi mengenai program bantuan sosial. Bu Wiwit menjelaskan bahwa informasi pencairan PKH dan BPNT biasanya diperoleh

melalui ketua kelompok PKH atau pendamping sosial. Namun, informasi yang diterima umumnya hanya berupa perkiraan waktu pencairan sehingga penerima manfaat tetap harus mengecek rekening secara mandiri. Beliau menyampaikan:

> "Informasi jadwal pencairan kadang dari ketua kelompok PKH, kadang juga langsung dari pendamping lapangan. Tapi tidak pasti cairnya kapan, hanya diinfokan akan segera cair. Jadi saya biasanya cek ATM sendiri." (Wawancara 7 Mei 2026)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa akses informasi mengenai bantuan sosial sebenarnya telah tersedia melalui pendamping sosial dan kelompok KPM. Namun, informasi mengenai waktu pencairan belum selalu dapat dipastikan sehingga penerima manfaat masih harus melakukan pengecekan secara mandiri.

Selain informasi, kemudahan pencairan bantuan juga menjadi bagian dari sumber daya yang mendukung pelaksanaan program. Bu Karina menjelaskan bahwa mekanisme pencairan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau ATM dinilai lebih mudah dibandingkan sistem sebelumnya yang dilakukan melalui kantor pos. Beliau menyampaikan:

> "Selama ini tidak ada kesulitan pencairan setelah lewat ATM atau KKS. Kalau dulu lewat kantor pos agak sulit karena harus antre panjang, tidak bisa diwakilkan, dan jaraknya lumayan jauh." (Wawancara pada 3 Mei 2026)

Hal serupa disampaikan oleh Bu Kosmiati yang menyatakan bahwa proses pencairan bantuan melalui KKS tidak menimbulkan kendala berarti. Informasi mengenai PKH dan BPNT diperoleh dari pendamping sosial, sedangkan informasi bantuan pangan biasanya disampaikan melalui pemerintah desa dan RT:

> "Kalau untuk mencairkan bantuan tidak ada kesulitan karena langsung lewat KKS. Informasi PKH dan BPNT biasanya dari pendamping sosial. Kalau bantuan sembako biasanya dapat undangan dari desa yang diantarkan oleh Pak RT." (Wawancara pada 4 Mei 2026)

Berdasarkan keterangan para informan, mekanisme pencairan bantuan melalui KKS telah memberikan kemudahan bagi penerima manfaat dibandingkan mekanisme sebelumnya. Selain itu, informasi mengenai bantuan sosial juga dapat diperoleh melalui pendamping sosial, pemerintah desa, maupun RT. Meskipun demikian, kepastian informasi mengenai jadwal pencairan bantuan masih menjadi kendala yang cukup sering dirasakan oleh penerima manfaat.

Dari sisi perangkat desa, Kasi Kesra menjelaskan bahwa pelayanan bantuan sosial didukung oleh pembagian tugas antara Kasi Kesra dan operator pelayanan. Kasi Kesra lebih banyak terlibat dalam pendataan, pemantauan, serta pelayanan langsung kepada masyarakat, sedangkan operator pelayanan bertugas melakukan pengecekan dan pengelolaan data melalui sistem yang tersedia. Beliau menjelaskan:

> "Kalau untuk prosedur administrasi seperti pengecekan data di database DTSEN itu bagiannya operator pelayanan. Kalau yang mendata masyarakat atau survei langsung ke masyarakat itu bagian saya selaku Kasi Kesra." (Wawancara 12 Mei 2026)

Keterangan tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas yang cukup jelas dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Operator pelayanan berperan dalam pengelolaan data dan administrasi, sedangkan Kasi Kesra lebih banyak berinteraksi langsung dengan masyarakat. Pembagian peran tersebut membantu pelaksanaan program karena data yang tersedia dalam sistem tetap perlu didukung oleh informasi dan kondisi faktual yang ditemukan di lapangan.

Selain pembagian tugas, Kasi Kesra juga menjelaskan bahwa kendala yang sering dihadapi berkaitan dengan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengajuan bantuan sosial. Menurutnya, masyarakat saat ini dapat melakukan pengecekan maupun pengajuan melalui aplikasi Cek Bansos, tetapi tidak semua warga memahami cara penggunaannya. Beliau menyampaikan:

> "Kendalanya biasanya warga banyak yang kurang tahu tentang bagaimana pengajuan bantuan sosial. Sekarang pengajuannya bisa lewat Cek Bansos. Desa hanya mengarahkan kalau ada warga yang datang. Kalau ada lansia yang tidak bisa, biasanya dibantu perangkat dengan membawa KK dan KTP." (Wawancara pada 12 Mei 2026)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa aplikasi Cek Bansos telah menjadi sarana pendukung dalam pelayanan bantuan sosial. Namun, pemanfaatannya belum dapat dilakukan secara mandiri oleh seluruh masyarakat, terutama kelompok lansia dan warga yang memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi. Oleh karena itu, peran perangkat desa masih diperlukan untuk membantu proses pengajuan maupun pengecekan bantuan sosial agar layanan dapat diakses oleh seluruh kelompok masyarakat.

Operator pelayanan juga memperkuat keterangan tersebut. Menurutnya, data bantuan sosial saat ini telah terintegrasi dalam DTSEN dan dapat diakses melalui aplikasi Cek Bansos. Dalam pelaksanaannya, operator lebih banyak membantu masyarakat melakukan pengecekan status bantuan serta memberikan arahan apabila masyarakat ingin mengajukan usulan atau sanggahan data. Beliau menyampaikan:

> "Tugas operator biasanya hanya bisa mengecek kalau masyarakat ingin mengecek status bantuannya. Kalau ingin mengusulkan bantuan, saya arahkan untuk mengajukan diri di aplikasi Cek Bansos. Kalau tidak bisa, saya arahkan ke Dinas Sosial." (Wawancara pada 12 Mei 2026)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam pengelolaan bantuan sosial lebih banyak bersifat administratif dan fasilitatif. Pemerintah desa dapat membantu masyarakat memperoleh informasi serta memberikan pendampingan dalam proses pengajuan bantuan, tetapi kewenangan untuk menetapkan maupun mengubah data penerima bantuan berada pada sistem dan instansi yang berwenang. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat masih menganggap pemerintah desa sebagai pihak yang menentukan bantuan, padahal proses penetapannya mengacu pada mekanisme yang lebih luas.

Bagi pemerintah desa, aplikasi Cek Bansos membantu proses pelayanan karena masyarakat dapat melakukan pengecekan data secara mandiri. Namun, berdasarkan keterangan informan sebelumnya, pemanfaatan aplikasi tersebut belum sepenuhnya dapat dilakukan secara mandiri oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan operator pelayanan dan perangkat desa tetap dibutuhkan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan bantuan sosial berbasis digital.

Gambar 4.4 Tampilan Menu Aplikasi Cek Bansos



Sumber: *Dokumentasi Peneliti, 2026.*

Berdasarkan gambar 4.4 di atas, aplikasi Cek Bansos menyediakan beberapa menu yang dapat digunakan masyarakat untuk memperoleh informasi dan melakukan proses administrasi bantuan sosial. Namun, berdasarkan keterangan Kasi Kesra dan operator pelayanan, tidak semua masyarakat mampu

menggunakan aplikasi tersebut secara mandiri. Warga lanjut usia atau masyarakat yang kurang memahami teknologi masih membutuhkan bantuan perangkat desa. Berdasarkan keterangan informan, aplikasi Cek Bansos telah membantu proses pelayanan bantuan sosial karena masyarakat dapat melakukan pengecekan data dan pengajuan bantuan secara lebih mudah. Namun, tidak semua masyarakat mampu memanfaatkan aplikasi tersebut secara mandiri. Lansia dan warga yang kurang memahami teknologi masih memerlukan bantuan perangkat desa untuk mengakses layanan yang tersedia dalam aplikasi.

Operator pelayanan juga menjelaskan bahwa kendala teknis dalam sistem tidak terlalu dominan, tetapi kendala lebih sering muncul dari kesulitan masyarakat memahami alur data dan bantuan sosial. Beliau menyampaikan:

> "Kendala teknisnya tidak ada. Tapi kesulitan menjelaskan persoalan data dan sistem ke masyarakat itu ada, karena kadang mereka tidak mengerti dan tidak mau mencari informasi sendiri. Kalau datang ke kantor desa, baru saya informasikan alurnya." (Wawancara 12 Mei 2026)

Dari keterangan operator pelayanan dapat diketahui bahwa kendala yang sering dihadapi bukan terletak pada sistem yang digunakan, melainkan pada pemahaman masyarakat terhadap mekanisme bantuan sosial. Meskipun informasi mengenai bantuan dapat diakses melalui berbagai saluran, tidak semua warga memahami alur pengajuan, verifikasi, maupun penetapan penerima bantuan. Kondisi tersebut menyebabkan perangkat desa masih sering menjadi tempat masyarakat mencari informasi dan penjelasan terkait bantuan sosial.

Dari sisi pendamping sosial, ketersediaan sumber daya menjadi persoalan yang lebih kompleks karena berkaitan dengan jumlah pendamping, jumlah KPM yang didampingi, cakupan wilayah kerja, serta intensitas pendampingan yang dapat dilakukan. Pendamping sosial menjelaskan bahwa sumber daya yang tersedia belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan pendampingan secara optimal. Beliau menyampaika:

> "Kalau dari jumlah pendamping memang masih kurang. Satu pendamping bisa memegang dua sampai tiga desa, padahal satu desa saja dusunnya banyak dan KPM-nya juga banyak. Jadi pengawasan tidak bisa terlalu intensif." (Wawancara pada 18 Mei 2026)

Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah pendamping memengaruhi pelaksanaan pendampingan di lapangan. Selain menyampaikan informasi terkait bantuan sosial, pendamping juga memiliki tugas melakukan pertemuan kelompok, memberikan edukasi kepada KPM, memantau kewajiban penerima bantuan, mendorong graduasi, serta menindaklanjuti berbagai

keluhan yang muncul di masyarakat. Dengan cakupan wilayah yang luas dan jumlah penerima manfaat yang cukup banyak, proses pendampingan dan pengawasan belum dapat dilakukan secara maksimal.

Pendamping sosial juga menjelaskan bahwa di Desa Dawuhan Kidul terdapat 170 KPM yang menjadi sasaran pendampingan. Menurutnya, salah satu kendala yang sering ditemui berkaitan dengan kondisi data penerima bantuan yang tidak selalu sesuai dengan keadaan masyarakat di lapangan. Beliau menjelaskan:

> "Kendala data itu salah satunya data KPM tidak sama dengan kondisi nyata. Kalau ada perubahan kondisi KPM, biasanya pendamping mengusulkan graduasi ke pusat atau mendatangi KPM yang sudah mampu secara ekonomi agar mengundurkan diri dari bantuan sosial." (Wawancara pada 18 Mei 2026)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa data merupakan sumber daya penting dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Namun, keberadaan data saja belum cukup apabila tidak diikuti dengan pemutakhiran yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Perubahan kondisi ekonomi penerima manfaat yang terjadi di lapangan sering kali tidak langsung tercermin dalam data yang digunakan sebagai dasar penetapan bantuan. Akibatnya, masih ditemukan penerima bantuan yang dinilai sudah mampu secara ekonomi, sementara terdapat masyarakat lain yang merasa layak menerima bantuan tetapi belum terdaftar sebagai penerima manfaat.

Selain sumber daya manusia dan data, kegiatan pendampingan juga didukung oleh media komunikasi seperti grup WhatsApp dan pertemuan bulanan KPM. Pendamping sosial menjelaskan bahwa setiap dusun memiliki kelompok KPM, dan setiap kelompok memiliki grup WhatsApp untuk menyampaikan informasi. Beliau menyampaikan:

> "Di setiap dusun ada kelompok KPM atau kelompok PKH. Satu dusun biasanya ada dua sampai tiga kelompok. Setiap kelompok ada grup WhatsApp masing-masing, dan setiap bulan ada pertemuan. Jadi informasi bisa langsung tersampaikan." (Wawancara pada 18 Mei 2026)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan tidak hanya didukung oleh keberadaan pendamping sosial, tetapi juga oleh media komunikasi yang mempermudah penyampaian informasi kepada KPM. Pertemuan kelompok dan grup WhatsApp membantu pendamping dalam menyampaikan informasi program, memberikan edukasi, serta memantau perkembangan penerima manfaat. Namun, informasi mengenai jadwal pencairan bantuan masih bergantung pada informasi dari pemerintah pusat sehingga tidak selalu dapat dipastikan oleh pendamping sosial.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul telah didukung oleh berbagai sumber daya, baik berupa sumber daya manusia, sistem data, sarana komunikasi, maupun mekanisme pelayanan berbasis digital. Perangkat desa, operator pelayanan, dan pendamping sosial memiliki peran masing-masing dalam mendukung pelaksanaan program. Selain itu, keberadaan DTSEN, aplikasi Cek Bansos, grup WhatsApp KPM, serta sistem pencairan melalui KKS turut membantu proses pelayanan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Meskipun demikian, beberapa kendala masih ditemukan dalam pelaksanaannya. Jumlah pendamping sosial yang terbatas dibandingkan dengan jumlah KPM dan luas wilayah kerja menyebabkan pendampingan belum dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, masih ditemukan perbedaan antara data penerima bantuan dengan kondisi masyarakat di lapangan, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap layanan digital, serta ketidakpastian informasi terkait waktu pencairan bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sumber daya pendukung telah membantu pelaksanaan program, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kualitas data, kapasitas pelaksana, dan kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi bantuan sosial.

3. Karakteristik Badan Pelaksana:

Karakteristik badan pelaksana merupakan salah satu indikator dalam model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang berkaitan dengan struktur pelaksana, pembagian tugas, kewenangan, serta hubungan kerja antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Pada program pengentasan kemiskinan, karakteristik badan pelaksana dapat dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program serta bagaimana pembagian tugas dilakukan dalam mendukung penyaluran dan pelayanan bantuan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul melibatkan beberapa pihak, yaitu pemerintah pusat, Dinas Sosial, pemerintah desa, pendamping sosial, RT, kepala dusun, serta masyarakat penerima manfaat. Masing-masing pihak memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda. Program PKH dan BPNT lebih banyak melibatkan pendamping sosial serta sistem data yang terintegrasi dalam DTSEN. Sementara itu, bantuan pangan berupa beras atau sembako melibatkan pemerintah desa, RT, kepala dusun, dan perangkat desa dalam proses penyampaian informasi maupun penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Berdasarkan informasi informan, BLT Dana Desa terakhir disalurkan pada tahun 2025 melalui mekanisme musyawarah desa. Namun, pada saat penelitian dilakukan program tersebut sudah tidak menjadi program bantuan yang dominan. Pelaksanaan bantuan sosial yang berjalan saat ini lebih banyak mengacu pada data DTSEN serta koordinasi antara pemerintah desa, pendamping sosial, dan Dinas Sosial.

Kepala Desa Dawuhan Kidul menjelaskan bahwa informasi mengenai pelaksanaan bantuan sosial umumnya berasal dari pemerintah pusat dan disampaikan melalui koordinasi dengan Dinas Sosial. Beliau menyampaikan:

> "Informasinya biasanya langsung dari pusat, tapi tetap ada koordinasi juga dengan Dinas Sosial." (Wawancara 14 Mei 2026)

Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah desa tidak menjadi pihak yang menentukan kebijakan maupun sasaran penerima bantuan sosial. Pemerintah desa lebih banyak berperan dalam membantu pelayanan masyarakat, menyampaikan informasi program, serta berkoordinasi dengan pihak terkait apabila terdapat persoalan mengenai bantuan sosial di tingkat desa.

Dari sisi penerima manfaat, KPM memahami bahwa terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan sosial. Bu Wiwit menjelaskan bahwa untuk bantuan beras dari desa, pihak yang terlibat antara lain RT, Kaur Kesra, dan kepala dusun. Sementara itu, untuk PKH dan BPNT, ia lebih banyak berhubungan dengan pendamping sosial. Beliau menyampaikan:

> "Kalau sembako beras itu saya diberi undangan dari desa oleh Pak RT. Di balai desa dijelaskan alur pengambilannya oleh Pak Kaur Kesra dan Pak Kepala Dusun. Kalau PKH dan BPNT itu urusannya sama pendamping lapangan dari kecamatan." (Wawancara pada 7 Mei 2026)

Keterangan Bu Wiwit menunjukkan bahwa masyarakat dapat membedakan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan sosial berdasarkan jenis bantuan yang diterima. Pada bantuan pangan atau sembako, masyarakat lebih banyak berinteraksi dengan RT, kepala dusun, dan perangkat desa. Sementara itu, pada program PKH dan BPNT, masyarakat lebih mengenal peran pendamping sosial sebagai pihak yang memberikan informasi dan pendampingan kepada KPM.

Keterangan serupa juga disampaikan oleh Bu Karina. Ia menyebutkan bahwa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan sosial antara lain RT, Kasi Kesra, kepala dusun, Kasi Perencanaan, staf pelayanan di kantor desa, staf perangkat, dan pendamping lapangan. Menurutnya, aparat desa biasanya membantu menjelaskan informasi bantuan yang berkaitan dengan undangan atau pengambilan bantuan di kantor desa, sedangkan pendamping lapangan lebih banyak menjelaskan PKH dan BPNT dalam pertemuan kelompok. Beliau menjelaskan:

> "Pihak yang terlibat setahu saya ada RT yang menyampaikan undangan, Kasi Kesra, kepala dusun, Kasi Perencanaan, staf pelayanan di kantor desa, dan pendamping lapangan. Kalau PKH dan BPNT biasanya dijelaskan oleh

pendamping lapangan saat pertemuan kelompok setiap satu bulan sekali." (Wawancara pada 3 Mei 2026)

Keterangan tersebut juga diperkuat oleh Bu Kosmiati yang menyebutkan bahwa RT berperan dalam menyampaikan informasi atau undangan kepada masyarakat, sedangkan perangkat desa membantu pelayanan dan penyaluran bantuan di tingkat desa. Di sisi lain, pendamping sosial menjadi pihak yang lebih sering berhubungan dengan KPM dalam pelaksanaan PKH dan BPNT, terutama melalui pertemuan kelompok dan kegiatan pendampingan rutin.:

"Yang saya tahu di desa ada Pak Kasi Kesra dan Pak Kasun yang mendata saat penyaluran bantuan beras di kantor desa. Pak RT hanya memberikan undangan. Kalau pihak lain ada pendamping sosial di lapangan." (Wawancara pada 04 Mei 2026)

Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul melibatkan beberapa pelaksana dengan tugas yang berbeda. Masyarakat tidak hanya berhubungan dengan satu pihak, tetapi dengan beberapa aktor sesuai jenis bantuan yang diterima. Pembagian peran tersebut membantu proses pelayanan karena setiap pelaksana memiliki tugas yang relatif jelas dalam pelaksanaan program bantuan sosial.

Dari sisi pemerintah desa, Kasi Kesra menjelaskan bahwa tugasnya dalam pelaksanaan bantuan sosial berkaitan dengan pendataan, pemantauan keluarga, pendampingan saat penyaluran bantuan tertentu, serta pelayanan kepada masyarakat yang datang menanyakan bantuan sosial. Beliau menjelaskan:

"Tugas saya selaku Kasi Kesra biasanya pendataan, pemantauan keluarga, dan kalau ada dari pihak kantor pos yang mau menyalurkan bantuan biasanya lewat saya. Saya yang mengarahkan ke warga, menemani, dan biasanya ikut survei." (Wawancara pada 12 Mei 2026)

Berdasarkan keterangan tersebut, Kasi Kesra tidak hanya terlibat dalam proses administrasi, tetapi juga berhubungan langsung dengan masyarakat selama pelaksanaan bantuan sosial. Peran tersebut terlihat dalam kegiatan pendataan, pendampingan saat penyaluran bantuan, serta pelayanan kepada warga yang membutuhkan informasi terkait bantuan sosial.

Kasi Kesra juga menjelaskan bahwa pelaksanaan bantuan sosial di tingkat desa dilakukan melalui pembagian tugas antarperangkat desa. Operator pelayanan lebih banyak menangani pengecekan data, sedangkan Kasi Kesra dan kepala dusun lebih banyak berhubungan langsung dengan masyarakat. Beliau menyampaikan:

> “Perangkat desa yang biasanya terlibat dalam pendataan itu Kasi Kesra. Untuk pelayanan itu bagian pelayanan, Mas Dian sebagai operator. Untuk penyampaian informasi bantuan biasanya ada saya sebagai Kasi Kesra dan kepala dusun.” (Wawancara pada 12 Mei 2026)

Keterangan tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas yang cukup jelas di tingkat desa. Operator pelayanan berperan dalam pengelolaan dan pengecekan data, sedangkan Kasi Kesra dan kepala dusun lebih banyak terlibat dalam pelayanan serta penyampaian informasi kepada masyarakat. Pembagian tugas tersebut membantu pelaksanaan bantuan sosial karena setiap perangkat desa menjalankan fungsi yang berbeda sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Operator pelayanan juga menjelaskan bahwa tugasnya lebih banyak berkaitan dengan pengecekan status bantuan dan memberikan arahan kepada masyarakat yang ingin mengajukan maupun menyanggah data bantuan sosial. Ia menyampaikan:

> “Tugas operator biasanya hanya bisa mengecek kalau masyarakat ingin mengecek status bantuannya. Kalau ingin mengusulkan bantuan, saya arahkan untuk mengajukan diri di aplikasi Cek Bansos. Kalau tidak bisa, saya arahkan ke Dinas Sosial.” (Wawancara pada 12 Mei 2026)

Berdasarkan keterangan tersebut, operator pelayanan lebih berperan dalam membantu masyarakat memperoleh informasi mengenai status bantuan sosial dan prosedur pengajuan data. Operator tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan penerima bantuan, tetapi membantu masyarakat memahami mekanisme yang harus ditempuh apabila ingin mengusulkan maupun memperbarui data bantuan sosial.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Desa Dawuhan Kidul. Menurut beliau, data penerima bantuan saat ini lebih banyak berasal dari pemerintah pusat, sedangkan pemerintah desa berperan membantu proses pelayanan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat. Beliau menjelaskan:

> “Kalau sekarang, data penerima lebih banyak dari pusat. Desa biasanya tinggal membantu menyalurkan, seperti bantuan sembako, beras, dan minyak.” (Wawancara 14 Mei 2026)

Selain itu, operator pelayanan juga menjelaskan bahwa data bantuan sosial telah terintegrasi dengan sistem dari pemerintah pusat sehingga pemerintah desa tidak dapat secara langsung menetapkan maupun mengubah data penerima bantuan. Ia menjelaskan:

> “Data-data itu biasanya langsung otomatis dari pusat. Kalau ada warga yang menanyakan status data bantuan sosial, biasanya langsung ke operator

pelayanan desa atau bisa ke pendamping. Kalau merasa datanya belum masuk atau perlu diperbarui, saya arahkan ke Cek Bansos atau langsung ke Dinas Sosial." (Wawancara pada 12 Mei 2026)

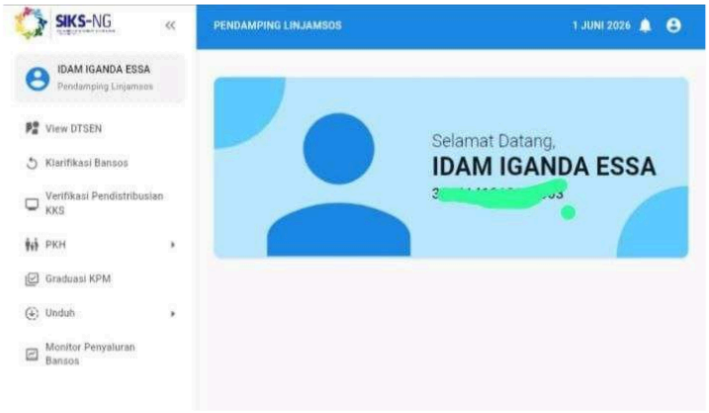
Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah desa dalam pelaksanaan bantuan sosial lebih banyak berada pada aspek pelayanan dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Sementara itu, penetapan dan perubahan data penerima bantuan dilakukan melalui mekanisme yang berada di luar kewenangan pemerintah desa. Kondisi ini menjelaskan mengapa perangkat desa sering menerima pertanyaan atau keluhan dari masyarakat, meskipun keputusan terkait data penerima bantuan tidak sepenuhnya berada di tingkat desa.

Dari sisi pendamping sosial, pelaksanaan program bantuan sosial melibatkan beberapa pihak yang saling berhubungan mulai dari pemerintah pusat, Dinas Sosial, pendamping sosial, hingga pemerintah desa. Pendamping sosial menjelaskan bahwa pelaksanaan program mengikuti alur koordinasi yang telah ditetapkan dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa. Beliau menyampaikan:

"Koordinasinya itu dari kementerian pusat, lalu di bawahnya ada ketua tim, kemudian dinas sosial, baru ke pendamping sosial di lapangan kecamatan, lalu turun ke desa. Untuk pelaporan ada web SIKMA Mobile yang langsung dari pusat." (Wawancara pada 18 Mei 2026)

Selain koordinasi antar pelaksana, pendamping sosial juga didukung oleh sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya. Salah satu sistem yang digunakan adalah Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang memuat informasi mengenai penerima bantuan sosial.

Gambar 4.5 Dashboard SIKS-NG Pendamping Sosial



Sumber: *Data Penelitian, 2026*

Gambar 4.5 menunjukkan dashboard SIKS-NG yang dapat diakses oleh pendamping sosial sebagai sarana pendukung dalam pelaksanaan tugas pendampingan dan pengelolaan informasi penerima bantuan sosial. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa karakteristik badan pelaksana dalam PKH dan BPNT memiliki struktur vertikal yang cukup kuat. Kementerian dan dinas sosial menjadi aktor yang menentukan kebijakan dan sistem, sedangkan pendamping sosial menjadi pelaksana di lapangan. Pemerintah desa berperan sebagai mitra dalam verifikasi, penyampaian informasi, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pendamping sosial juga menjelaskan bahwa pelaksanaan program bantuan sosial melibatkan kerja sama antara pendamping sosial, pemerintah desa, Dinas Sosial, dan pemerintah pusat. Menurutnya, koordinasi administrasi selama ini berjalan cukup baik, terutama dalam proses penyampaian informasi dan verifikasi data. Namun, dalam pelaksanaannya terkadang muncul perbedaan pandangan terkait kondisi masyarakat yang dianggap layak atau tidak layak menerima bantuan sosial.

Pendamping sosial juga menegaskan bahwa pembagian peran dalam pelaksanaan program sudah cukup jelas. Menurutnya, pemerintah desa, terutama Kasi Kesra, lebih banyak menangani pelayanan bantuan sosial di tingkat desa, sedangkan pendamping sosial bertugas melakukan pendampingan terhadap penerima manfaat program PKH dan BPNT. Beliau menjelaskan:

> "Pembagian peran sudah jelas. Kalau di desa urusannya biasanya dengan Kasi Kesra karena beliau bagian kesejahteraan masyarakat. Kalau di lapangan, urusannya dengan pendamping sosial, terutama untuk bantuan sosial seperti PKH dan BPNT." (Wawancara pada 18 Mei 2026)

Berdasarkan keterangan tersebut, setiap pelaksana memiliki tugas yang berbeda sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemerintah desa lebih banyak berperan dalam pelayanan dan penyampaian informasi kepada masyarakat, sedangkan pendamping sosial berfokus pada kegiatan pendampingan dan pemantauan penerima manfaat. Pembagian tugas tersebut membantu pelaksanaan program karena masyarakat dapat mengetahui pihak yang harus dihubungi sesuai dengan kebutuhan dan jenis bantuan yang diterima.

Terkait BLT Dana Desa, karakteristik pelaksana program berbeda dengan PKH dan BPNT. Berdasarkan keterangan perangkat desa, BLT Dana Desa terakhir disalurkan pada tahun 2025 dan penerimanya ditentukan melalui mekanisme musyawarah desa. Namun, pada saat penelitian dilakukan program tersebut sudah tidak lagi berjalan. Pelaksanaan bantuan sosial yang aktif pada saat penelitian lebih banyak mengacu pada DTSEN serta mekanisme usul dan sanggah melalui aplikasi Cek Bansos.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul melibatkan beberapa pihak dengan tugas yang berbeda. Di tingkat desa, Kasi Kesra, operator pelayanan, RT, kepala dusun, dan perangkat desa berperan dalam pelayanan kepada masyarakat, penyampaian informasi, pengecekan data, serta penyaluran bantuan tertentu. Pada program PKH dan BPNT, pendamping sosial berperan dalam kegiatan pendampingan, penyampaian informasi, pemantauan penerima manfaat, serta pelaksanaan pertemuan kelompok. Sementara itu, pengelolaan data dan kebijakan bantuan sosial berada pada tingkat yang lebih tinggi melalui Dinas Sosial dan pemerintah pusat.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pemerintah desa lebih banyak berperan sebagai pelaksana pelayanan dan penghubung antara masyarakat dengan sistem bantuan sosial yang berlaku. Meskipun masyarakat sering menyampaikan pertanyaan maupun keluhan kepada pemerintah desa, kewenangan desa dalam menentukan dan mengubah status penerima bantuan relatif terbatas karena penetapan data penerima mengacu pada sistem yang terintegrasi dengan pemerintah pusat. Kondisi tersebut menjadi salah satu karakteristik pelaksanaan program bantuan sosial yang ditemukan dalam penelitian ini.

4. **Disposisi atau Sikap Para Pelaksana:**

   Disposisi atau sikap pelaksana merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Indikator ini berkaitan dengan komitmen, respons, dan penerimaan pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan. Dalam program pengentasan kemiskinan, sikap pelaksana menjadi penting karena mereka berhubungan langsung dengan masyarakat yang menerima maupun mengajukan bantuan sosial.

Dalam penelitian ini, sikap pelaksana dapat dilihat dari cara pemerintah desa, Kasi Kesra, operator pelayanan, kepala dusun, RT, dan pendamping sosial memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sikap tersebut terlihat ketika pelaksana menyampaikan informasi bantuan, menerima keluhan masyarakat, membantu proses pengajuan bantuan, maupun memberikan penjelasan terkait data penerima bantuan sosial.

Dari sisi pemerintah desa, Kepala Desa Dawuhan Kidul menegaskan bahwa pemerintah desa berupaya mendukung pelaksanaan program bantuan sosial selama program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat. Beliau menyampaikan:

> "Selama untuk kepentingan warga, tentu kami dukung. Desa ikut mendampingi, menyampaikan info, dan tampung keluhan. Kalau ada keluhan soal bantuan, kami dengar dulu, jelaskan sesuai data dan kewenangan. Yang bisa dibantu desa, kami bantu; yang tidak, diteruskan ke pendamping atau instansi terkait. Pokoknya, warga jangan sampai merasa ditolak." (Wawancara 14 Mei 2026)

Dari sisi KPM, Bu Wiwit menilai bahwa pelaksana dari pemerintah desa bersikap sabar dan telaten ketika memberikan penjelasan mengenai bantuan sosial. Menurutnya, aparat desa membantu menjelaskan bantuan yang diterima, persyaratan yang harus dibawa, serta alur pengambilan bantuan. Beliau menyampaikan:

> "Dari desa itu telaten dan sabar kalau ditanya-tanya tentang bantuan, dapat apa saja, harus membawa persyaratan apa saja. Kalau mengeluh kenapa belum cair, mereka hanya menjawab sabar karena prosesnya dari pusat memang lama." (Wawancara pada 7 Mei 2026)

Dari keterangan Bu Wiwit dapat diketahui bahwa aparat desa dinilai cukup sabar dan terbuka ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun tidak selalu dapat memberikan kepastian mengenai waktu pencairan bantuan, aparat desa tetap berusaha menjelaskan informasi yang diketahui dan menanggapi pertanyaan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai sikap pelaksana di tingkat desa cukup baik, meskipun terdapat persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara langsung oleh pemerintah desa.

Bu Wiwit juga menyampaikan bahwa aparat desa bersikap adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, ketidakpastian informasi mengenai pencairan bantuan masih tetap dirasakan oleh penerima manfaat. Temuan ini menunjukkan bahwa keluhan masyarakat tidak selalu berkaitan dengan sikap pelaksana, tetapi juga dipengaruhi oleh informasi dan keputusan yang berasal dari tingkat yang lebih tinggi.

Pandangan yang hampir sama disampaikan oleh Bu Karina. Menurutnya, aparat desa bersedia melayani masyarakat yang datang untuk bertanya mengenai bantuan sosial dan memberikan penjelasan terkait persyaratan maupun prosedur yang harus dilakukan. Akan tetapi, informasi lanjutan mengenai perkembangan pengajuan maupun jadwal pencairan bantuan tidak selalu dapat dijelaskan secara pasti oleh pelaksana di tingkat desa.

> "Sikap aparat desa saat melayani masyarakat biasanya dijelaskan saja, disuruh ke kantor desa, harus bawa apa ke kantor desa. Tapi kurang dijelaskan programnya apa dan adanya setiap bulan apa, mereka juga tidak tahu pastinya karena hanya melaksanakan. Kalau butuh informasi harus benar-benar tanya langsung. Pelayanannya sudah baik, keluhan ditanggapi, tapi kadang tidak ada tindak lanjut, lama, tidak jelas info selanjutnya, hanya disuruh menunggu." (Wawancara 3 Mei 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sikap pelaksana dinilai cukup baik dalam menerima pertanyaan masyarakat, tetapi masih terdapat kelemahan pada tindak lanjut informasi. Pelaksana mampu memberikan layanan administratif, namun belum selalu mampu menjelaskan program secara mendalam atau memberikan kepastian atas keluhan yang disampaikan. Hal ini terjadi karena sebagian informasi, terutama jadwal pencairan dan status penerima bantuan, bergantung pada sistem dan instansi di atas desa.

Keterangan Bu Kosmiati menunjukkan bahwa masyarakat menilai aparat desa dan pendamping sosial cukup mudah dihubungi ketika dibutuhkan. Masyarakat tidak selalu harus datang ke kantor desa untuk memperoleh informasi karena aparat desa dapat ditemui secara langsung di lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu, pertemuan kelompok yang dilakukan pendamping sosial juga menjadi sarana bagi KPM untuk menyampaikan pertanyaan maupun keluhan terkait bantuan sosial yang diterima.:

> "Sikap aparat desa saat melayani masyarakat sangat sabar menjelaskan kalau bertanya dan mudah ditemui, tidak harus di kantor, kadang bisa langsung datang ke rumahnya. Kalau ada keluhan atau pertanyaan biasanya ditanggapi. Untuk PKH dan BPNT langsung ke pendamping sosial saat pertemuan kelompok, bisa langsung diskusi dan diarahkan." (Wawancara 4 Mei 2026)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses yang cukup baik kepada pelaksana program. Kemudahan berkomunikasi dengan aparat desa maupun pendamping sosial membantu masyarakat memperoleh informasi dan menyampaikan permasalahan yang dihadapi selama menerima bantuan sosial.

Dari sisi Kasi Kesra, sikap pelaksana terlihat dari cara pemerintah desa menanggapi warga yang datang bertanya atau mengeluh mengenai bantuan sosial. Kasi Kesra menjelaskan bahwa warga sering mengeluh karena merasa tidak menerima bantuan, sementara warga lain yang dianggap lebih mampu justru menerima bantuan. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Kasi Kesra mengarahkan warga untuk mengecek status bantuan dan melakukan pengajuan mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Beliau menyampaikan:

> "Biasanya warga mengeluh kenapa tidak dapat bantuan, padahal yang lebih kaya kok dapat. Kalau mereka seperti itu, saya suruh cek hasilnya dulu, lalu saya arahkan untuk daftar mandiri di aplikasi Cek Bansos. Kalau mereka tidak bisa, seperti lansia, biasanya dibantu perangkat untuk mengajukan dengan membawa KK dan KTP." (Wawancara 12 Mei 2026)

Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah desa tidak hanya menerima keluhan masyarakat, tetapi juga berusaha memberikan penjelasan dan arahan terkait mekanisme bantuan sosial yang berlaku. Ketika masyarakat mempertanyakan status bantuan yang diterima, perangkat desa biasanya mengarahkan warga untuk melakukan pengecekan data atau mengajukan usulan melalui aplikasi Cek Bansos. Bagi masyarakat yang mengalami kesulitan, terutama lansia, perangkat desa turut membantu proses pengajuan bantuan. Keterangan tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah desa sering berhadapan dengan keluhan masyarakat terkait ketepatan sasaran bantuan sosial. Dalam kondisi tersebut, perangkat desa harus menjelaskan prosedur yang berlaku sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai mekanisme penentuan penerima bantuan yang saat ini lebih banyak mengacu pada sistem data.

Kasi Kesra juga menyampaikan bahwa sebagian masyarakat masih salah paham terhadap kewenangan desa. Masyarakat sering menganggap desa sebagai pihak yang menentukan siapa yang menerima bantuan, padahal menurutnya mekanisme bantuan saat ini lebih banyak mengacu pada sistem data. Beliau menjelaskan:

> "Kadang warga salah paham, mengira yang mengusulkan bantuan itu desa. Padahal sekarang bantuan bisa diajukan mandiri lewat Cek Bansos. Mereka kadang tidak mau mencari informasi sendiri. Kalau lansia biasanya diarahkan dan dibantu." (Wawancara pada 12 Mei 2026)

Menurut Kasi Kesra, sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pemerintah desa merupakan pihak yang menentukan penerima bantuan sosial. Padahal, proses penetapan penerima bantuan saat ini lebih banyak mengacu pada data yang terintegrasi dalam sistem. Kondisi tersebut menyebabkan perangkat desa sering menjadi tempat masyarakat menyampaikan keluhan,

meskipun kewenangan desa dalam menentukan penerima bantuan relatif terbatas.

Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksana di tingkat desa tidak hanya dituntut memahami prosedur bantuan sosial, tetapi juga harus mampu menjelaskan mekanisme program kepada masyarakat yang memiliki pemahaman dan kebutuhan yang beragam.

Operator pelayanan juga menjelaskan bahwa banyak warga datang ke kantor desa untuk menanyakan status bantuan sosial. Menurutnya, kesulitan bukan terletak pada sistem teknis, tetapi pada proses menjelaskan alur data dan bantuan kepada masyarakat yang belum memahami mekanisme bantuan sosial. Ia menyampaikan:

> "Banyak warga yang langsung ke kantor. Kesulitan menjelaskan persoalan data dan sistem ke masyarakat itu ada, karena kadang mereka tidak mengerti dan tidak mau mencari informasi sendiri. Kalau ke sini, baru saya informasikan bagaimana alurnya." (Wawancara pada 12 Mei 2026

Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat masih banyak yang datang langsung ke kantor desa untuk menanyakan bantuan sosial. Dalam kondisi tersebut, operator pelayanan tidak hanya membantu pengecekan data, tetapi juga menjelaskan prosedur dan alur bantuan sosial kepada masyarakat yang belum memahaminya. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga penyampaian informasi kepada masyarakat.

Operator pelayanan juga menyampaikan bahwa apabila ada warga yang merasa datanya belum masuk atau perlu diperbarui, ia mengarahkan warga untuk menggunakan aplikasi Cek Bansos atau langsung ke Dinas Sosial. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa operator pelayanan berusaha membantu masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Apabila terdapat persoalan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat desa, masyarakat diarahkan untuk menggunakan aplikasi Cek Bansos atau menghubungi Dinas Sosial. Namun, tidak semua warga dapat mengikuti arahan tersebut dengan mudah, terutama masyarakat yang kurang memahami penggunaan teknologi atau prosedur bantuan sosial yang berlaku.

Dari sisi pendamping sosial, disposisi pelaksana terlihat dari komitmen dalam mendampingi KPM, memberikan informasi, memantau kewajiban penerima, dan mendorong kemandirian. Pendamping sosial menjelaskan bahwa tugas pendamping tidak hanya menyampaikan informasi bantuan, tetapi juga mengubah pola pikir KPM agar tidak terus bergantung pada bantuan. Beliau menyampaikan:

> "Tugas paling menantang bagi pendamping lapangan adalah mengubah pola pikir masyarakat melalui pertemuan bulanan, agar mereka tidak terus-

menerus bergantung pada bantuan pemerintah dan termotivasi untuk mandiri sampai bisa graduasi." (Wawancara 18 Mei 2026)

Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa pendamping sosial tidak hanya bertugas menyampaikan informasi mengenai bantuan sosial, tetapi juga melakukan pendampingan kepada KPM melalui pertemuan kelompok. Pendamping berupaya memberikan pemahaman kepada penerima manfaat agar bantuan yang diterima tidak dipandang sebagai sumber penghasilan yang bersifat tetap, melainkan sebagai dukungan sementara untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Namun, pendamping sosial juga menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan KPM yang secara ekonomi sudah mampu tetapi tidak bersedia mengundurkan diri dari bantuan sosial. Beliau menyampaikan:

"Di lapangan ada warga yang ekonominya sudah mapan dan secara fisik terlihat mampu, tetapi tetap bersikeras menolak mengundurkan diri dari kepesertaan bantuan sosial, padahal mereka sadar dengan kondisinya." (Wawancara 18 Mei 2026)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pendamping sosial sering menghadapi kondisi yang tidak mudah di lapangan. Selain mendampingi penerima manfaat, pendamping juga harus memberikan pemahaman kepada masyarakat yang dinilai sudah mampu secara ekonomi agar bersedia mengundurkan diri dari kepesertaan bantuan sosial. Kondisi tersebut membutuhkan pendekatan dan komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun konflik dengan masyarakat.

Pendamping sosial juga menjelaskan bahwa apabila terdapat KPM yang belum memahami aturan atau kewajiban program, biasanya pendamping memberikan penjelasan langsung saat pertemuan bulanan. KPM yang tidak memenuhi kewajiban, seperti tidak hadir dalam pertemuan atau tidak mengumpulkan bukti kehadiran anak di sekolah, akan diberi peringatan. Hal ini menunjukkan bahwa sikap pendamping tidak hanya bersifat membantu, tetapi juga mengawasi dan mengingatkan KPM agar menjalankan kewajiban program.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul secara umum menunjukkan sikap yang cukup baik. KPM menilai aparat desa dan pendamping sosial bersikap sabar, mudah ditemui, dan bersedia menjelaskan informasi yang dibutuhkan. Kasi Kesra dan operator pelayanan juga menunjukkan sikap membantu dengan mengarahkan masyarakat untuk mengecek status bantuan atau melakukan pengajuan melalui Cek Bansos. Pendamping sosial menunjukkan komitmen dalam mendampingi

KPM melalui pertemuan bulanan, pemberian informasi, pemantauan kewajiban, dan dorongan menuju kemandirian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat desa, operator pelayanan, dan pendamping sosial pada umumnya berusaha memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Masyarakat juga menilai bahwa pelaksana cukup mudah ditemui, bersedia memberikan penjelasan, serta menanggapi pertanyaan maupun keluhan yang disampaikan. Sikap tersebut terlihat dari upaya pelaksana dalam membantu pengecekan data, memberikan arahan terkait pengajuan bantuan, serta mendampingi penerima manfaat dalam pelaksanaan program.

Meskipun demikian, pelaksana masih menghadapi berbagai kendala dalam memberikan pelayanan. Keterbatasan kewenangan pemerintah desa, ketidakpastian informasi mengenai pencairan bantuan, rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap mekanisme bantuan sosial, serta adanya penerima manfaat yang belum bersedia graduasi menjadi tantangan yang ditemui selama pelaksanaan program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sikap pelaksana yang cukup terbuka dan responsif telah membantu pelaksanaan program, tetapi hasil yang dicapai tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar kendali pelaksana.

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksanaan:

Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksanaan merupakan salah satu indikator penting dalam implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Indikator ini berkaitan dengan bagaimana informasi kebijakan disampaikan, bagaimana koordinasi antaraktor berjalan, serta bagaimana pelaksana memastikan bahwa prosedur program dapat dipahami oleh pihak yang terlibat maupun masyarakat sebagai kelompok sasaran. Dalam implementasi program pengentasan kemiskinan, komunikasi menjadi penting karena program bantuan sosial melibatkan banyak aktor, mulai dari pemerintah pusat, dinas sosial, pendamping sosial, pemerintah desa, RT, kepala dusun, hingga Keluarga Penerima Manfaat.

Di Desa Dawuhan Kidul, komunikasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan berjalan melalui beberapa jalur. Untuk PKH dan BPNT, komunikasi lebih banyak dilakukan melalui pendamping sosial, ketua kelompok PKH, grup WhatsApp, dan pertemuan rutin KPM. Untuk bantuan beras atau sembako, komunikasi dilakukan melalui pemerintah desa dengan bantuan RT yang menyampaikan undangan kepada warga penerima. Sementara itu, untuk pengecekan status bantuan atau pengusulan data, masyarakat diarahkan menggunakan aplikasi Cek Bansos atau datang ke perangkat desa untuk memperoleh bantuan teknis.

Dari sisi KPM, Bu Wiwit menjelaskan bahwa informasi mengenai PKH, BPNT, dan PIP biasanya diperoleh dari pendamping lapangan. Informasi tersebut juga disampaikan melalui pertemuan kelompok dan grup WhatsApp.

Namun, ia menyampaikan bahwa informasi yang masih kurang jelas adalah kepastian jadwal pencairan. Beliau menyampaikan:

> "Saya dapat informasi bantuan PKH, BPNT, dan PIP dari pendamping lapangan. Setiap bulan kelompok bansos ada pertemuan rutin di rumah ketua kelompok, lalu ada grup WhatsApp juga untuk koordinasi. Yang agak kurang jelas itu jadwal pencairannya, karena hanya diberi tahu akan segera cair, tapi tidak pasti kapan." (Wawancara 7 Mei 2026)

Dari keterangan Bu Wiwit dapat diketahui bahwa informasi mengenai bantuan sosial disampaikan melalui beberapa cara, yaitu pertemuan kelompok dan grup WhatsApp yang dikelola pendamping sosial. Melalui kedua media tersebut, KPM dapat memperoleh informasi mengenai bantuan yang diterima maupun kegiatan yang berkaitan dengan program. Namun, informasi mengenai waktu pencairan bantuan belum selalu dapat disampaikan secara pasti sehingga penerima manfaat masih harus menunggu informasi lanjutan atau melakukan pengecekan secara mandiri.

Bu Karina juga menyampaikan bahwa informasi mengenai PKH dan BPNT biasanya diperoleh dari pendamping lapangan melalui grup PKH dan pertemuan kelompok setiap bulan. Menurutnya, pertemuan tersebut juga menjadi sarana untuk menyampaikan kewajiban KPM, seperti kehadiran dalam pertemuan dan kewajiban mengumpulkan absensi sekolah anak bagi KPM yang memiliki anak usia sekolah. Beliau menjelaskan:

> "Kalau PKH dan BPNT biasanya dapat informasi dari pendamping lapangan langsung lewat pertemuan setiap satu bulan sekali. Informasi juga disampaikan di grup WhatsApp. Kalau tidak ikut pertemuan tiga kali nanti dapat peringatan. Untuk ibu-ibu yang dapat PKH dan anaknya masih sekolah wajib mengumpulkan absensi kehadiran di kelas." (Wawancara 3 Mei 2026)

Keterangan Bu Karina menunjukkan bahwa pertemuan kelompok tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai bantuan sosial, tetapi juga digunakan untuk menyampaikan kewajiban yang harus dipenuhi oleh KPM. Melalui pertemuan tersebut, pendamping sosial dapat memberikan arahan, mengingatkan kewajiban penerima manfaat, serta menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program PKH dan BPNT.

Sementara itu, untuk bantuan beras atau sembako, Bu Karina menjelaskan bahwa informasi biasanya diperoleh melalui undangan dari desa yang disampaikan oleh RT. Setelah menerima undangan, warga datang ke kantor desa dengan membawa dokumen yang diminta, seperti KK, undangan, dan KTP. Beliau menyampaikan:

> “Untuk sembako beras, saya dapat undangan dari desa melalui Pak RT. Besoknya datang ke kantor desa membawa KK, undangan, dan KTP. Di sana sudah ada kepala dusun, Kaur Kesra, dan staf perangkat.” (Wawancara 3 Mei 2026)

Dari keterangan Bu Karina dapat diketahui bahwa penyampaian informasi bantuan beras atau sembako dilakukan melalui pemerintah desa dan RT. RT berperan menyampaikan undangan kepada warga, sedangkan perangkat desa membantu menjelaskan prosedur pengambilan bantuan saat penyaluran berlangsung. Mekanisme ini berbeda dengan PKH dan BPNT yang lebih banyak disampaikan melalui pendamping sosial dan pertemuan kelompok KPM.

Bu Kosmiati juga menyampaikan bahwa informasi mengenai PKH dan BPNT diperoleh dari pendamping sosial, sedangkan informasi bantuan sembako diperoleh melalui undangan dari desa yang diantarkan oleh RT. Menurutnya, informasi yang diberikan pendamping cukup mudah dipahami, meskipun terdapat banyak aturan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh KPM. Beliau menyampaikan:

> “Informasi dari pendamping mudah dipahami, tapi banyak peraturan dan tugas KPM yang harus dilakukan. Kalau tidak ikut pertemuan tiga kali dapat peringatan. Untuk balita harus rutin ke posyandu, lansia ikut posbindu, dan anak sekolah harus ada absensi.” (Wawancara 4 Mei 2026)

Keterangan Bu Kosmiati menunjukkan bahwa informasi mengenai PKH dan BPNT tidak hanya disampaikan pada saat pencairan bantuan, tetapi juga melalui pertemuan kelompok yang dilakukan secara rutin. Dalam pertemuan tersebut, pendamping sosial menyampaikan berbagai informasi terkait kewajiban penerima manfaat serta aturan yang harus dipatuhi oleh KPM. Melalui pertemuan kelompok dan grup WhatsApp, informasi program dapat disampaikan secara langsung kepada penerima manfaat. Meskipun demikian, Bu Kosmiati juga menyampaikan bahwa informasi mengenai waktu pencairan bantuan belum selalu dapat diketahui secara pasti. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi mengenai aturan program sudah berjalan cukup baik, tetapi informasi terkait jadwal pencairan bantuan masih sering berubah dan bergantung pada informasi yang diterima dari tingkat yang lebih tinggi.

Dari sisi pemerintah desa, Kasi Kesra menjelaskan bahwa alur informasi bantuan sosial saat ini banyak berasal dari pihak di atas desa, seperti kantor pos, kecamatan, dinas sosial, atau sistem data bantuan sosial. Pemerintah desa kemudian membantu menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat. Beliau menjelaskan:

> “Kalau mereka dapat dari pusat, biasanya dari kantor pos atau kecamatan ke kantor desa untuk menyampaikan warga yang dapat. Nanti saya sebagai Kasi Kesra membantu menyampaikan langsung ke rumah warga. Untuk pencairan bantuan seperti beras, informasi disampaikan ke masyarakat lewat undangan yang dibagikan oleh RT.” (Wawancara 12 Mei 2026)

Dari keterangan Kasi Kesra dapat diketahui bahwa informasi mengenai bantuan sosial tidak langsung diterima oleh masyarakat, tetapi disampaikan melalui beberapa tahapan. Informasi yang diterima pemerintah desa dari kantor pos, kecamatan, maupun instansi terkait kemudian diteruskan kepada masyarakat melalui perangkat desa, kepala dusun, dan RT. Dengan cara tersebut, informasi mengenai bantuan dapat disampaikan kepada warga yang menjadi sasaran program.

Namun, Kasi Kesra juga menyampaikan bahwa keterlambatan atau ketidakjelasan informasi masih sering terjadi, terutama terkait jadwal pencairan bantuan. Beliau menyampaikan:

> “Informasi keterlambatan ketidakjelasan ya sering. Kadang bantuannya dibilang mau cair bulan ini, tapi sampai akhir bulan belum ada laporan kapan tepatnya cair.” (Wawancara 12 Mei 2026)

Temuan tersebut didukung oleh dokumen undangan penerima bantuan pangan yang diperoleh peneliti. Berdasarkan dokumen tersebut, bantuan pangan alokasi Februari–Maret 2026 dijadwalkan untuk diambil pada tanggal 8 April 2026. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan informasi dari pemerintah desa, bantuan tersebut baru direalisasikan kepada masyarakat pada bulan Juni 2026. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jadwal yang tercantum dalam informasi penyaluran dengan realisasi pelaksanaan di lapangan.

Gambar 4.6 Undangan Penerima Bantuan Pangan



UNDANGAN PENERIMA
BANTUAN PANGAN TAHUN 2026

Provinsi : JAWA TIMUR
Kabupaten/Kota : KAB. KEDIRI
Kecamatan : Papar
Kelurahan/Desa : Dawuhan Kidul

Kab. Kediri, Selasa, 31 Maret 2026

Nomor : UND/31/03/26/154138
Perihal : UNDANGAN
Kepada Yth :
[redacted]IEM
[redacted]008700001
DAWUHAN KIDUL
RT 3 / RW 1

Mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara besok pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 8 April 2026
Jam : -- s.d -- Waktu Setempat
Tempat : Kantor Kelurahan
Keperluan : Mengambil Bantuan Pangan alokasi bulan Februari - Maret 2026 sebanyak 20 Kg Beras dan 4 liter Minyak Goreng
Persyaratan :
1. Membawa undangan ini
2. Jika diambil sendiri: Membawa KTP dan fotocopy KK
3. Jika diwakilkan dalam 1 KK: membawa KTP orang yang mewakili, fotocopy KTP orang yang diwakili, dan fotocopy KK
4. Jika diwakilkan diluar KK: membawa KTP asli dan fotocopy KK orang yang mewakili, serta fotocopy KTP dan fotocopy KK orang yang diwakili
5. Jika pengganti: membawa KTP dan fotocopy KK yang menggantikan

Harap diambil tepat pada waktunya. Jika setelah 5 (lima) hari tidak diambil tanpa keterangan, akan dilakukan penggantian PBP.
Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih

Hormat Kami,
Perum BULOG
bulog

No. Urut
133

3506142006605J7

Sumber: *Dokumentasi Peneliti, 2026*

Operator pelayanan juga menyampaikan bahwa informasi mengenai bantuan sosial biasanya diperoleh dari Dinas Sosial melalui rapat atau pemberitahuan kepada pihak desa. Namun, ia juga menyebut bahwa ketidakjelasan jadwal pencairan masih sering ditemukan. Beliau menjelaskan:

> "Informasi tentang bansos biasanya dari Dinas Sosial lewat rapat, pihak desa diundang untuk rapat bersama tentang program-program. Kalo untuk pencairannya sendiri kalo yang sembako itu dari kantor pos yang ngasih taunya ke desa. Tapi keterlambatan informasi sering banget terjadi. Baru-baru ini katanya bulan ini ada pencairan sembako beras, tetapi informasinya juga tidak jelas kapan." (Wawancara 12 Mei 2026)

Keterangan operator pelayanan menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan bantuan sosial sebenarnya sudah berjalan melalui rapat dan penyampaian informasi kepada pemerintah desa. Namun, informasi yang diterima desa belum selalu disertai kepastian mengenai waktu penyaluran bantuan. Akibatnya, pemerintah desa sering mengalami kesulitan ketika harus menjawab pertanyaan masyarakat mengenai kapan bantuan akan diterima.

Dalam hal pengecekan dan pengusulan bantuan, operator pelayanan menjelaskan bahwa masyarakat dapat diarahkan menggunakan aplikasi Cek Bansos. Aplikasi tersebut digunakan untuk mengecek status bantuan, melakukan pengusulan, atau menyampaikan sanggahan. Namun, apabila

masyarakat tidak memahami penggunaan aplikasi, perangkat desa membantu memberikan arahan. Operator menjelaskan:

> "Kalau masyarakat ingin mengecek status bantuannya, biasanya langsung ke operator pelayanan desa. Kalau ingin mengusulkan bantuan, saya arahkan untuk mengajukan diri di aplikasi Cek Bansos. Kalau tidak bisa, saya arahkan ke Dinas Sosial." (Wawancara 12 Mei 2026)

Dari keterangan operator pelayanan dapat diketahui bahwa masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai bantuan sosial melalui aplikasi Cek Bansos maupun melalui perangkat desa. Namun, tidak semua masyarakat dapat menggunakan aplikasi tersebut secara mandiri. Karena itu, sebagian warga masih datang langsung ke kantor desa untuk meminta bantuan dalam melakukan pengecekan data maupun pengajuan bantuan sosial.

Sejalan dengan pernyataan itu, Kepala Desa Dawuhan Kidul juga menjelaskan bahwa mekanisme bantuan sosial saat ini sudah lebih banyak diarahkan melalui sistem daring. Pemerintah desa tidak lagi mendata secara langsung seperti sebelumnya, tetapi lebih banyak mengarahkan masyarakat untuk melakukan pengecekan melalui Cek Bansos. Beliau menyampaikan:

> "Sekarang sistemnya sudah online. Jadi kalau ada warga yang belum masuk bantuan, biasanya desa mengarahkan untuk cek lewat Cek Bansos. Kalau dulu memang desa masih ikut mendata, tapi itu sudah lama." (Wawancara pada 14 Mei 2026)

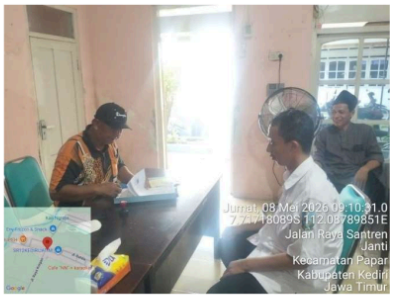
Keterangan Kepala Desa menunjukkan bahwa penyampaian informasi mengenai bantuan sosial saat ini semakin banyak dilakukan melalui sistem digital. Meskipun demikian, pemerintah desa tetap berperan dalam memberikan arahan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan atau informasi terkait status bantuan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi antara masyarakat dan program bantuan sosial tidak hanya berlangsung melalui sistem daring, tetapi juga melalui pelayanan langsung yang diberikan oleh pemerintah desa.

Dari sisi pendamping sosial, komunikasi pelaksanaan PKH dan BPNT dilakukan melalui struktur yang berjenjang. Pendamping menjelaskan bahwa koordinasi program berjalan dari kementerian, ketua tim, dinas sosial, pendamping sosial di lapangan, hingga desa dan kelompok KPM. Beliau menyampaikan:

> "Koordinasinya dari kementerian pusat, lalu di bawahnya ada ketua tim, kemudian Dinas Sosial, baru ke pendamping sosial di lapangan kecamatan, lalu turun ke desa. Untuk pelaporannya ada web SIKS-NG Mobile yang langsung dari pusat." (Wawancara 18 Mei 2026)

Dari keterangan pendamping sosial dapat diketahui bahwa penyampaian informasi dan koordinasi program dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Informasi yang diterima pendamping sosial kemudian disampaikan kepada KPM melalui pertemuan kelompok maupun media komunikasi yang digunakan dalam kegiatan pendampingan. Selain berhubungan dengan KPM, pendamping sosial juga melakukan koordinasi dengan pemerintah desa apabila terdapat informasi atau persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan bantuan sosial di lapangan.

Gambar 4.7 Koordinasi Pendamping Sosial dengan Kepala Desa Dawuhan Kidul



Sumber: *Dokumentasi Pendamping Sosial, 2026.*

Pada gambar 4.7 menunjukkan adanya komunikasi antara pendamping sosial dan pemerintah desa dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi tersebut dilakukan untuk menyampaikan informasi program, membahas kondisi penerima manfaat, serta menindaklanjuti berbagai persoalan yang muncul di lapangan. Keterangan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya melibatkan komunikasi antara pendamping sosial dan KPM, tetapi juga membutuhkan koordinasi dengan pemerintah desa sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Gambar 4.8 Rapat Koordinasi SDM PKH Kabupaten Kediri



Sumber: *Dokumentasi Pendamping Sosial, 2026.*

Gambar 4.8 menunjukkan adanya kegiatan koordinasi SDM PKH di tingkat Kabupaten Kediri. Kegiatan ini menjadi bagian dari komunikasi antarorganisasi karena pendamping sosial tidak bekerja secara terpisah, melainkan berada dalam struktur pelaksanaan program yang terhubung dengan Dinas Sosial dan struktur pelaksana di atasnya. Melalui rapat koordinasi tersebut, informasi program, evaluasi pelaksanaan, serta kendala pendampingan di lapangan dapat disampaikan secara lebih terarah.

Pendamping sosial juga menjelaskan bahwa komunikasi kepada KPM dilakukan melalui kelompok PKH di tiap dusun. Setiap dusun memiliki beberapa kelompok, dan setiap kelompok memiliki grup WhatsApp. Selain itu, terdapat pertemuan rutin setiap bulan.

Gambar 4.9 Grup WhatsApp sebagai Media Komunikasi antara Pendamping Sosial dan KPM



Sumber: *Dokumentasi Penelitian, 2026*

Untuk mempermudah penyampaian informasi program, pendamping sosial memanfaatkan grup WhatsApp sebagai media komunikasi dengan KPM. Melalui grup tersebut, informasi terkait pencairan bantuan, administrasi program, dan kegiatan pendampingan dapat disampaikan secara lebih cepat kepada anggota kelompok. Selain itu beliau menyampaikan:

> "Di setiap dusun ada kelompok KPM atau kelompok PKH. Satu dusun biasanya ada dua sampai tiga kelompok. Setiap kelompok ada grup WhatsApp masing-masing, dan setiap bulan pasti ada pertemuan. Jadi informasi bisa langsung tersampaikan." (Wawancara 18 Mei 2028)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pelaksanaan program tidak hanya berlangsung saat bantuan cair, tetapi juga melalui pendampingan rutin. Pertemuan bulanan digunakan untuk menyampaikan aturan baru, mengingatkan kewajiban KPM, memberikan edukasi, serta membahas kendala yang dihadapi penerima manfaat. Pola ini membuat komunikasi antara pendamping sosial dan KPM relatif terstruktur.

Gambar 4.10 Pertemuan Rutin Pendamping Sosial dengan KPM Desa Dawuhan Kidul



Sumber: *Dokumentasi Pendamping Sosial, 2026.*

Berdasarkan gambar 4.10 tersebut, pertemuan rutin antara pendamping sosial dan KPM menjadi salah satu bentuk aktivitas pelaksanaan program di tingkat desa. Kegiatan ini berfungsi sebagai ruang komunikasi langsung antara pendamping dan penerima manfaat. Dalam pertemuan tersebut, KPM memperoleh informasi mengenai kewajiban penerima bantuan, seperti kehadiran anak di sekolah, keikutsertaan balita dalam posyandu, keikutsertaan lansia dalam posbindu, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan kepesertaan program. Dengan demikian, pertemuan rutin tidak hanya berfungsi sebagai

sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai bentuk pendampingan agar KPM memahami hak dan kewajibannya dalam program.

Meskipun demikian, pendamping sosial juga menyampaikan bahwa informasi mengenai pencairan bantuan tidak selalu dapat dipastikan oleh pendamping. Menurutnya, pencairan bantuan memang dilakukan secara rapel, tetapi tanggal pencairan berasal dari pusat dan dapat berbeda antar-KPM. Beliau menyampaikan:

> "Pencairan itu memang tiga bulan sekali, tapi tanggal tepatnya pendamping sendiri juga tidak tahu pasti karena langsung dari pusat. Pencairannya juga tidak selalu sama, ada yang cair tanggal ini, ada yang tanggal lain, bahkan kadang ada yang tidak cair di periode itu." (Wawancara 18 Mei 2026)

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa kendala komunikasi mengenai jadwal pencairan tidak hanya dialami oleh KPM, tetapi juga oleh pendamping sosial sebagai pelaksana lapangan. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan informasi dari sistem pusat kepada pelaksana lapangan. Akibatnya, pendamping sosial hanya dapat menyampaikan informasi umum kepada KPM tanpa selalu mampu memberikan kepastian waktu pencairan.

27 Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul dilakukan melalui berbagai cara. Pada program PKH dan BPNT, informasi lebih banyak disampaikan melalui pendamping sosial, pertemuan kelompok, dan grup WhatsApp. Pada bantuan pangan, informasi disampaikan melalui pemerintah desa dan RT dalam bentuk undangan pengambilan bantuan. Sementara itu, pengecekan maupun pengusulan bantuan dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos dengan bantuan perangkat desa apabila masyarakat mengalami kesulitan.

Meskipun komunikasi antar pelaksana dan masyarakat sudah berjalan, beberapa kendala masih ditemukan dalam pelaksanaan program. Kendala yang paling sering muncul berkaitan dengan ketidakpastian informasi mengenai jadwal pencairan dan penyaluran bantuan. Kondisi tersebut terlihat dari keterangan KPM, pemerintah desa, maupun pendamping sosial yang sama-sama menyampaikan bahwa informasi waktu pencairan tidak selalu dapat diketahui secara pasti. Temuan ini juga diperkuat oleh dokumen undangan bantuan pangan yang menunjukkan adanya perbedaan antara jadwal yang tercantum dalam undangan dengan waktu realisasi bantuan di lapangan.

Selain itu, sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memahami mekanisme bantuan sosial yang saat ini banyak menggunakan sistem digital. Akibatnya, pemerintah desa dan pendamping sosial tetap menjadi sumber informasi utama yang sering didatangi masyarakat ketika membutuhkan penjelasan mengenai bantuan sosial. Temuan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi program telah berjalan melalui berbagai

saluran, tetapi kepastian informasi dan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme bantuan masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program.

6. **Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik:**

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam model implementasi Van Meter dan Van Horn, kondisi lingkungan di sekitar kebijakan dapat memperkuat atau menghambat pelaksanaan program. Pada program pengentasan kemiskinan, faktor lingkungan menjadi penting karena bantuan sosial diberikan dalam ruang sosial yang sensitif. Bantuan tidak hanya berkaitan dengan prosedur administrasi, tetapi juga dengan kondisi ekonomi keluarga, persepsi keadilan, hubungan antarwarga, serta kepercayaan masyarakat terhadap pelaksana program.

Di Desa Dawuhan Kidul, lingkungan sosial-ekonomi masyarakat masih dipengaruhi oleh pekerjaan yang tidak selalu tetap, kebutuhan rumah tangga yang terus berjalan, serta ketergantungan sebagian keluarga terhadap bantuan sosial. Berdasarkan data desa, mata pencaharian masyarakat didominasi oleh sektor pertanian. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian rumah tangga bergantung pada pendapatan yang dipengaruhi musim, hasil panen, pekerjaan harian, dan peluang kerja informal. Situasi tersebut membuat bantuan sosial memiliki arti penting bagi keluarga penerima manfaat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan anak, listrik, cicilan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Kepala Desa Dawuhan Kidul menjelaskan bahwa kondisi sosial-ekonomi masyarakat sangat memengaruhi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Menurut beliau, masih terdapat warga dengan pendapatan tidak tetap, seperti pekerja serabutan dan buruh tani, sehingga bantuan sosial masih sangat dibutuhkan. Beliau menyampaikan:

> "Banyak warga di sini penghasilannya pas-pasan, kerja serabutan terus kebanyakan juga cuman buruh tani musiman, jadi bantuan sangat dibutuhkan, kadang masih kurang. Kadang muncul rasa iri atau banding-bandingkan soal bantuan antar warga. Makanya kami jelaskan, datanya ada aturan dan prosesnya, supaya warga paham." (Wawancara 14 Mei 2026)

Dari keterangan Kepala Desa dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi masyarakat masih menjadi alasan utama mengapa bantuan sosial tetap dibutuhkan. Sebagian warga bekerja sebagai buruh tani atau pekerja dengan pendapatan yang tidak menentu sehingga bantuan sosial masih digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, pelaksanaan bantuan sosial juga memunculkan dinamika sosial di masyarakat. Perbedaan status penerima bantuan sering menimbulkan perbandingan dan pertanyaan antarwarga, terutama ketika terdapat masyarakat

yang merasa layak menerima bantuan tetapi belum terdaftar sebagai penerima manfaat. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah desa perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai mekanisme dan dasar penentuan penerima bantuan sosial.

Kondisi ekonomi keluarga penerima manfaat terlihat dari keterangan Bu Wiwit. Ia menyampaikan bahwa sebelum bantuan cair, keluarganya sering harus berutang terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini terjadi karena bantuan sosial yang diterima tidak cair setiap bulan, tetapi sering dirapel dalam beberapa bulan. Beliau menyampaikan:

> "Karena kebutuhan ekonomi mendesak dan bantuan sosial pencairannya dirapel, saya terpaksa berutang dulu ke tetangga. Kadang KKS saya jadikan jaminan. Kalau sudah cair, uangnya dipakai untuk menutup utang." (Wawancara 7 Mei 2026)

Pernyataan Bu Wiwit tersebut dapat diketahui bahwa bantuan sosial masih memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun, bantuan yang diterima belum selalu mampu mencukupi kebutuhan keluarga secara berkelanjutan karena pencairannya tidak selalu berlangsung sesuai waktu yang diharapkan. Akibatnya, penerima manfaat terkadang harus berutang terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan baru melunasinya setelah bantuan diterima.

Bu Wiwit juga menjelaskan bahwa kondisi keluarganya cukup berat karena terdapat tujuh anggota keluarga, sementara yang bekerja hanya tiga orang. Suaminya tidak bekerja karena sakit. Bantuan beras yang diterima setiap enam bulan sekali dinilai membantu, tetapi belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan keluarga. Beliau menyampaikan:

> "Beras 20 kg itu membantu, tapi masih kurang. Di rumah ada tujuh orang, yang bekerja hanya tiga orang, suami saya tidak bekerja karena sakit. Jadi kadang tetap gali lubang tutup lubang dengan berutang." (Wawancara 7 Mei 2026)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi keluarga penerima manfaat masih dipengaruhi oleh jumlah tanggungan keluarga dan kemampuan anggota keluarga untuk bekerja. Bagi keluarga dengan jumlah tanggungan yang banyak dan pendapatan yang terbatas, bantuan sosial membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga, terutama untuk kebutuhan pangan. Namun, bantuan yang diterima belum sepenuhnya mampu memenuhi seluruh kebutuhan keluarga sehingga sebagian penerima manfaat masih harus mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kondisi serupa juga disampaikan oleh Bu Karina. Ia menjelaskan bahwa sebelum menerima bantuan, keluarganya sempat mengalami kesulitan ekonomi

dan beberapa kali berutang untuk membayar cicilan. Setelah menerima bantuan, beban tersebut mulai berkurang meskipun kebutuhan rumah tangga tetap besar. Beliau menjelaskan:

> "Dulu sebelum dapat PKH, saya beberapa kali utang untuk bayar cicilan. Sekarang sudah tidak seperti dulu, walaupun masih punya cicilan. Bantuan yang paling terasa manfaatnya untuk sekolah anak dan kebutuhan makan. " (Wawancara pada 3 Mei 2026)

Keterangan Bu Karina menunjukkan bahwa bantuan sosial membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga, terutama untuk kebutuhan makan dan pendidikan anak. Meskipun demikian, kebutuhan rumah tangga yang cukup besar dan adanya kewajiban membayar cicilan membuat keluarga tetap harus mengatur pengeluaran dengan hati-hati. Kondisi ini menunjukkan bahwa bantuan sosial membantu meringankan beban ekonomi keluarga, tetapi belum sepenuhnya mengatasi seluruh kebutuhan rumah tangga.

Bu Kosmiati juga menyampaikan bahwa sebelum menerima bantuan, keluarganya mengalami keterbatasan ekonomi, terutama untuk membeli beras dan memenuhi kebutuhan anak saat pembelajaran jarak jauh. Ia menjelaskan bahwa bantuan sosial membuat beban keluarga lebih ringan dan membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Beliau menyampaikan:

> "Sebelum menerima bantuan, uang untuk membeli beras dan kebutuhan rumah sangat terbatas karena suami kerja serabutan. Waktu pandemi juga sulit memasang WiFi untuk sekolah anak. Setelah menerima bantuan, saya bisa memasang WiFi untuk anak sekolah dan sudah tidak sering berutang." (Wawancara 4 Mei 2026)

Keterangan Bu Kosmiati menunjukkan bahwa manfaat bantuan sosial tidak hanya dirasakan dalam pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Bagi keluarga dengan pendapatan yang tidak tetap, bantuan yang diterima dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sebelumnya sulit dijangkau. Dalam kasus Bu Kosmiati, bantuan sosial membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga sehingga kebutuhan pendidikan anak dapat lebih terpenuhi dibandingkan sebelumnya.

Selain kondisi ekonomi keluarga, lingkungan sosial masyarakat juga memengaruhi pelaksanaan program. Bantuan sosial sering menimbulkan perbandingan antarwarga, terutama ketika terdapat warga yang merasa lebih layak menerima bantuan tetapi tidak terdaftar sebagai penerima. Bu Wiwit menyampaikan bahwa tanggapan warga sekitar umumnya biasa saja, tetapi pernah muncul sindiran dari warga lain. Beliau menyampaikan:

> “Tanggapan warga ya seperti biasa saja karena mereka tahu saya banyak utang. Tapi pernah juga ada yang menyindir, sama-sama punya utang kok kamu dapat, aku tidak.” (Wawancara 7 Mei 2026)

Keterangan Bu Wiwit menunjukkan bahwa bantuan sosial tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi penerima manfaat, tetapi juga memunculkan tanggapan dari lingkungan sekitar. Ketika terdapat perbedaan antara penerima dan nonpenerima bantuan, sebagian masyarakat melakukan perbandingan berdasarkan kondisi yang mereka lihat sehari-hari. Kondisi tersebut dapat memunculkan sindiran atau pertanyaan mengenai alasan seseorang menerima bantuan sosial.

Bu Karina juga menyampaikan bahwa tanggapan masyarakat terhadap penerima bantuan beragam. Sebagian warga merasa iri karena tidak menerima bantuan, meskipun menurutnya kondisi ekonomi mereka lebih mampu. Ia menyampaikan:

> “Tanggapan tetangga beragam. Ada beberapa yang tidak suka, iri karena mereka tidak dapat, padahal mereka lebih mampu.” (Wawancara 3 Mei 2026)

Keterangan tersebut memperkuat temuan bahwa tanggapan masyarakat terhadap penerima bantuan sosial tidak selalu sama. Sebagian masyarakat menerima kondisi tersebut sebagai bagian dari program bantuan sosial, tetapi ada juga yang merasa iri atau mempertanyakan mengapa dirinya tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. Kondisi seperti ini cukup sering muncul karena masyarakat memiliki penilaian sendiri mengenai siapa yang dianggap layak menerima bantuan.

Bu Kosmiati juga mengalami tanggapan sosial serupa. Ia menyampaikan bahwa sebagian warga menilai dirinya masih menerima bantuan meskipun kondisi rumahnya sudah terlihat lebih baik. Beliau menyampaikan:

> “Ada warga yang bilang, enak ya sudah lama dapat bantuan sampai sekarang rumahnya sudah bagus masih dapat bansos.” (Wawancara dengan Bu Kosmiati, KPM)

Keterangan Bu Kosmiati menunjukkan bahwa masyarakat sering menilai kondisi ekonomi seseorang berdasarkan hal-hal yang tampak secara langsung, seperti kondisi rumah atau barang yang dimiliki. Sementara itu, penetapan penerima bantuan dilakukan berdasarkan data dan ketentuan yang digunakan dalam program bantuan sosial. Perbedaan cara pandang tersebut sering menimbulkan pertanyaan maupun perbincangan di masyarakat mengenai kelayakan penerima bantuan.

Dari sisi perangkat desa, Kasi Kesra juga menyampaikan bahwa kecemburuan sosial sering muncul dalam pelayanan bantuan sosial. Menurutnya, banyak warga yang protes karena merasa tidak mendapatkan bantuan, sementara warga lain yang dianggap lebih mampu justru menerima bantuan. Beliau menyampaikan:

> "Tekanan, keberatan, dan kecemburuan sosial itu ada. Banyak yang protes, kok tidak dapat, kok tidak dapat. Kalau mereka belum tahu, saya arahkan untuk daftar mandiri lewat Cek Bansos." (Wawancara 12 Mei 2026)

Keterangan Kasi Kesra menunjukkan bahwa keluhan dan pertanyaan masyarakat mengenai bantuan sosial masih sering disampaikan kepada pemerintah desa. Ketika terdapat warga yang merasa layak menerima bantuan tetapi belum terdaftar sebagai penerima, pemerintah desa menjadi pihak yang pertama kali didatangi untuk meminta penjelasan. Kondisi tersebut membuat perangkat desa harus memberikan informasi dan penjelasan kepada masyarakat mengenai mekanisme bantuan sosial yang berlaku. Kasi Kesra juga menjelaskan bahwa masih terdapat warga yang salah memahami kewenangan desa dalam pengusulan bantuan. Sebagian warga menganggap desa dapat langsung menentukan siapa yang menerima bantuan. Beliau menyampaikan:

> "Kadang warga salah paham, dikira yang mengusulkan bantuan itu desa. Padahal sekarang sudah beberapa tahun ini bantuan bisa diajukan mandiri lewat Cek Bansos. Kalau ada yang datang, ya kami arahkan." (Wawancara 12 Mei 2026)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menganggap pemerintah desa sebagai pihak yang menentukan penerima bantuan sosial. Akibatnya, ketika terdapat warga yang tidak menerima bantuan, keluhan sering kali disampaikan kepada pemerintah desa. Padahal, berdasarkan keterangan informan, mekanisme bantuan saat ini lebih banyak mengacu pada data dan sistem yang digunakan oleh pemerintah.

Operator pelayanan juga menyampaikan bahwa perbedaan antara data administrasi dan kondisi nyata warga di lapangan masih sering ditemukan. Ia menjelaskan bahwa ada warga yang secara fisik terlihat mampu, memiliki rumah bagus atau sawah luas, tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan. Beliau menyampaikan:

> "Pernah ditemukan perbedaan antara data administrasi dengan kondisi nyata warga di lapangan. Banyak juga yang di lapangan ternyata sawahnya lebar, rumahnya bagus, tapi masih mendapat bantuan." (Wawancara 12 Mei 2026)

Keterangan operator pelayanan menunjukkan bahwa kondisi masyarakat yang terlihat di lapangan tidak selalu sesuai dengan data yang digunakan dalam program bantuan sosial. Perbedaan tersebut sering menimbulkan pertanyaan dari masyarakat mengenai ketepatan sasaran bantuan. Kondisi ini juga menjadi salah satu penyebab munculnya keluhan dan perbandingan antarwarga terkait penerimaan bantuan sosial.

Pendamping sosial juga menguatkan bahwa kondisi sosial-ekonomi masyarakat memengaruhi jalannya program. Menurutnya, terdapat warga yang secara ekonomi sudah mapan tetapi tetap menolak untuk mengundurkan diri dari bantuan. Kondisi ini menjadi tantangan karena program bantuan sosial juga memiliki tujuan mendorong KPM agar dapat mandiri atau graduasi. Beliau menyampaikan:

> "Di lapangan ada warga yang ekonominya sudah mapan dan secara fisik terlihat mampu, tetapi tetap menolak mengundurkan diri dari bantuan sosial. Padahal mereka tahu kondisi ekonominya sudah lebih baik." (Wawancara 18 Mei 2026)

Keterangan pendamping sosial menunjukkan bahwa masih terdapat penerima bantuan yang menurut pendamping sudah mengalami perbaikan kondisi ekonomi, tetapi belum bersedia mengundurkan diri dari kepesertaan bantuan sosial. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam pelaksanaan program karena dapat menimbulkan perbedaan pandangan mengenai siapa yang seharusnya menerima bantuan. Selain itu, kondisi tersebut juga sering menjadi sumber keluhan masyarakat yang merasa lebih membutuhkan bantuan tetapi belum terdaftar sebagai penerima manfaat.

Pendamping sosial juga menyampaikan adanya penyalahgunaan bantuan oleh sebagian KPM. Menurutnya, bantuan yang seharusnya digunakan untuk gizi anak, sekolah, atau kebutuhan dasar kadang digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Beliau menyampaikan:

> "Kadang uang bansos yang seharusnya untuk gizi anak atau keperluan sekolah justru digunakan untuk membeli emas, kosmetik, atau kebutuhan konsumtif lainnya." (Wawancara 18 Mei 2026)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa lingkungan sosial dan pola konsumsi KPM juga berpengaruh terhadap efektivitas program. Bantuan sosial tidak otomatis menghasilkan perubahan kesejahteraan jika tidak digunakan sesuai tujuan. Oleh karena itu, pendampingan, edukasi pengelolaan keuangan, dan perubahan pola pikir menjadi bagian penting dalam implementasi program pengentasan kemiskinan.

Pendamping sosial juga menjelaskan bahwa kondisi sosial-ekonomi masyarakat berkaitan dengan perubahan data desil dalam DTSEN. Menurutnya,

sensus dari BPS, perubahan data Dukcapil, dan pembaruan data sosial-ekonomi dapat memengaruhi status kesejahteraan masyarakat. Beliau menyampaikan:

> "Kondisi sosial ekonomi masyarakat memengaruhi jalannya program. Sensus dari BPS juga memengaruhi tingkatan desil masyarakat di DTSEN. Perubahan data di Dukcapil juga bisa memengaruhi karena DTSEN itu basis data tunggal sosial ekonomi masyarakat." (Wawancara 18 Mei 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa lingkungan sosial-ekonomi tidak bersifat statis. Perubahan kondisi keluarga, pekerjaan, status kependudukan, dan hasil pendataan dapat memengaruhi posisi rumah tangga dalam data bantuan sosial. Karena itu, pembaruan data menjadi penting agar program tetap sesuai dengan kondisi aktual masyarakat.

Dari sisi politik lokal, dinamika yang muncul tidak selalu berbentuk politik formal, tetapi lebih banyak berupa tekanan sosial, keluhan warga, dan tuntutan terhadap pemerintah desa. Dalam pelaksanaan bantuan sosial, pemerintah desa berada pada posisi yang sensitif karena menjadi pihak yang paling mudah diakses oleh masyarakat. Warga yang tidak menerima bantuan sering menyampaikan keluhan kepada perangkat desa, meskipun penetapan penerima bantuan banyak ditentukan oleh sistem data dan instansi di atas desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa sering berada pada posisi yang sulit karena menjadi pihak yang pertama kali menerima pertanyaan maupun keluhan masyarakat terkait bantuan sosial. Meskipun penentuan penerima bantuan tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan desa, masyarakat tetap mengharapkan pemerintah desa dapat memberikan penjelasan maupun solusi atas persoalan yang mereka hadapi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat masih menjadi salah satu alasan utama mengapa bantuan sosial tetap dibutuhkan di Desa Dawuhan Kidul. Sebagian penerima manfaat masih memiliki pendapatan yang tidak tetap, jumlah tanggungan keluarga yang cukup besar, serta kebutuhan rumah tangga yang terus berjalan. Karena itu, bantuan sosial membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga, terutama untuk kebutuhan pangan, pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari.

Di sisi lain, pelaksanaan bantuan sosial juga memunculkan berbagai dinamika sosial di masyarakat. Perbedaan antara penerima dan nonpenerima bantuan sering menimbulkan perbandingan, keluhan, maupun kecemburuan sosial. Kondisi tersebut semakin terlihat ketika masyarakat menemukan adanya perbedaan antara kondisi warga yang terlihat di lapangan dengan data penerima bantuan yang tercatat dalam sistem. Selain itu, masih ditemukan penerima bantuan yang dinilai sudah mampu secara ekonomi tetapi belum bersedia mengundurkan diri dari kepesertaan bantuan sosial.

Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi program pengentasan kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme program dan

data administrasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat, hubungan sosial antarwarga, serta tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan bantuan sosial di lingkungan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa, pendamping sosial, hingga instansi terkait. Bantuan sosial yang diterima masyarakat membantu memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Namun, selama pelaksanaan program masih ditemukan beberapa persoalan, seperti ketepatan sasaran penerima bantuan, perbedaan antara data dan kondisi masyarakat di lapangan, ketidakpastian waktu pencairan bantuan, serta munculnya keluhan dan kecemburuan sosial di masyarakat. Temuan-temuan tersebut selanjutnya dianalisis pada bagian pembahasan berdasarkan enam indikator implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn.

4.2 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul telah dilaksanakan melalui berbagai program bantuan sosial, seperti PKH, BPNT, bantuan beras atau sembako, PIP, dan PBI-JK. Pelaksanaan program tidak hanya mencakup penyaluran bantuan, tetapi juga proses pendataan, pembaruan data penerima, pendampingan, penyampaian informasi, serta pelayanan kepada masyarakat.

Meskipun bantuan sosial telah membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat, hasil penelitian juga menunjukkan masih adanya beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut antara lain ketidaksesuaian data penerima dengan kondisi masyarakat di lapangan, keterlambatan pencairan bantuan, keterbatasan informasi yang diterima masyarakat, serta munculnya kecemburuan sosial di antara warga.

Untuk memahami kondisi tersebut secara lebih mendalam, pembahasan dilakukan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksanaan, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Berdasarkan penyajian data sebelumnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pengentasan kemiskinan melalui penyaluran bantuan sosial di Desa Dawuhan Kidul secara konseptual telah memiliki arah kebijakan yang jelas. Berdasarkan temuan lapangan, program reguler seperti PKH, BPNT, Bantuan Sembako, dan PBI-JK berhasil dijalankan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin. Pemerintah desa dalam menentukan kelayakan penerima manfaat juga telah beralih menggunakan basis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang membagi tingkat kesejahteraan warga berdasarkan kategori desil. Kejelasan tujuan ini terlihat dari adanya pemisahan sasaran yang spesifik pada masing-

masing program, di mana PKH difokuskan pada pemenuhan hak dasar klaster rentan seperti anak sekolah, lansia, dan disabilitas, sedangkan BPNT dan bantuan pangan diarahkan khusus untuk menopang kebutuhan karbohidrat dan gizi harian warga.

Namun, kejelasan standar program di tingkat pusat ini belum sepenuhnya berjalan lurus dengan ketepatan sasaran di tingkat desa. Peneliti masih menjumpai adanya persoalan akurasi data di lapangan, seperti keberadaan warga yang kondisi rumah dan ekonominya sudah membaik namun tetap terdaftar sebagai penerima aktif. Di sisi lain, beberapa keluarga yang secara kasatmata layak dibantu justru terlewat dari pendataan sistem. Selain masalah salah sasaran, hambatan teknis lainnya muncul dari pola penyaluran dana bantuan yang sering kali terlambat dan menumpuk di akhir (sistem rapel), sehingga manfaatnya tidak selalu bisa dinikmati oleh masyarakat pada saat kondisi ekonomi mereka sedang mendesak.Jika dikaji menggunakan teori Van Meter dan Van Horn, kejelasan target program di Desa Dawuhan Kidul sebenarnya sudah memiliki cantolan hukum yang kuat, yaitu Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN serta Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 79/HUK/2025 yang mengunci batas maksimal bantuan hanya pada Desil 1 sampai Desil 4. Kendati demikian, lemahnya akurasi data di lapangan menandakan bahwa standar operasional yang termuat dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 belum dieksekusi secara optimal. Regulasi tersebut sejatinya mewajibkan pihak desa untuk melakukan pembersihan data (cleansing) dan pemutakhiran peringkat desil secara berkala setiap tiga bulan sekali. Kelambatan perangkat desa dalam melakukan verifikasi ulang inilah yang memicu adanya jeda waktu (time-lag), sehingga perubahan status ekonomi riil masyarakat tidak langsung sinkron dengan data di sistem DTSEN pusat.

Temuan mengenai adanya ketidaktepatan sasaran akibat kendala pemutakhiran data ini konsisten dengan studi terdahulu oleh (Rakhmadani et al., 2022)yang menunjukkan bahwa validitas data lokal masih menjadi batu sandungan utama dalam efektivitas penyaluran bantuan sosial. Hasil penelitian ini juga memperkuat literatur dari (Sawitri & Rahmat, 2024) mengenai adanya hambatan pelaksanaan bansos di tingkat bawah. Namun, penelitian di Desa Dawuhan Kidul ini memberikan kontribusi baru dengan memperlihatkan bahwa migrasi data dari sistem DTKS lama ke sistem DTSEN yang baru ternyata belum otomatis menyelesaikan masalah ketidaksesuaian data administrasi dengan kondisi rill di masyarakat, terutama jika tidak diimbangi dengan kedisiplinan perangkat desa dalam melakukan pemutakhiran data berkala secara real-time.

Melihat sumbatan implementasi tersebut, kebijakan pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul pada indikator standar dan tujuan baru sebatas sukses pada tataran pemahaman regulasi, namun masih lemah dalam aspek akurasi eksekusi. Maka dari itu, solusi strategis yang dapat direkomendasikan adalah pelembagaan forum Musyawarah Desa (Musdes) khusus pemutakhiran data DTSEN secara rutin setiap triwulan untuk menyisir warga mampu di atas Desil 4. Selain itu, pemerintah desa perlu menginisiasi posko pengaduan mandiri di balai desa guna menjaring warga miskin yang belum masuk kuota agar dapat diusulkan secara aktif ke dalam sistem.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam teori Van Meter dan Van Horn (1975) mengacu pada ketersediaan sumber daya manusia, sarana, dan teknologi yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Pada penelitian ini, indikator sumber daya digunakan untuk melihat kecukupan dukungan yang dimiliki Desa Dawuhan Kidul dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan melalui berbagai bantuan sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul telah didukung oleh berbagai sumber daya, seperti pendamping sosial, perangkat desa, sistem DTSEN, aplikasi Cek Bansos, kartu KKS, serta media komunikasi berupa grup WhatsApp dan pertemuan KPM. Ketersediaan sarana tersebut membantu proses pendataan, koordinasi, dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Peralihan mekanisme pencairan bantuan melalui kartu KKS juga dinilai memudahkan masyarakat dalam mengakses bantuan sosial.

Namun demikian, peneliti masih menemukan beberapa kendala dalam pemanfaatan sumber daya tersebut. Jumlah pendamping sosial yang terbatas menyebabkan proses verifikasi, pemutakhiran data, dan pendampingan penerima manfaat belum berjalan secara optimal. Selain itu, sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memanfaatkan layanan digital yang tersedia sehingga memerlukan pendampingan dalam mengakses informasi bantuan sosial.

Ditinjau berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, sumber daya yang tersedia di Desa Dawuhan Kidul sebenarnya telah mendukung pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana dan teknologi, melainkan juga dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Temuan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang menekankan pentingnya dukungan kelembagaan dan kapasitas pelaksana dalam pemanfaatan data. Selain itu, Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 juga menegaskan pentingnya verifikasi dan pemutakhiran data secara berkala untuk menjaga akurasi data penerima bantuan sosial.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul pada indikator sumber daya telah didukung oleh ketersediaan sarana dan teknologi yang memadai. Namun, keterbatasan jumlah pendamping sosial dan kemampuan sebagian masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital masih menjadi hambatan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program.

Dengan demikian, implementasi program pengentasan kemiskinan pada indikator sumber daya telah memenuhi aspek ketersediaan sumber daya sebagaimana dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, tetapi efektivitas pemanfaatannya belum sepenuhnya optimal. Maka dari itu, Pemerintah Desa Dawuhan Kidul perlu memperkuat dukungan sumber daya manusia melalui pelibatan Ketua RT dan RW dalam proses verifikasi dan pemutakhiran data lapangan. Selain itu, pemerintah desa perlu menyediakan layanan konsultasi bantuan sosial bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan digital agar informasi dan pelayanan bantuan sosial dapat diterima secara lebih merata.

3. Karakteristik Badan Pelaksana

Indikator karakteristik badan pelaksana dalam teori Van Meter dan Van Horn (1975) berfokus pada struktur organisasi, pembagian tugas, serta hubungan kerja yang terbentuk di antara para pelaksana kebijakan. Pada penelitian ini, indikator karakteristik badan pelaksana digunakan untuk melihat bagaimana pembagian peran, kewenangan, dan koordinasi antaraktor dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul melibatkan berbagai aktor mulai dari pemerintah pusat, Dinas Sosial, pendamping sosial, pemerintah desa, kepala dusun, hingga RT. Pembagian tugas antaraktor tersebut menunjukkan adanya struktur pelaksana yang berjenjang dalam proses pendataan, verifikasi, penyaluran bantuan, dan pendampingan keluarga penerima manfaat. Pendamping sosial berperan dalam melakukan pendampingan dan pemantauan KPM, sedangkan pemerintah desa berperan dalam memberikan pelayanan, menyampaikan informasi, serta membantu proses usulan dan verifikasi data masyarakat.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki keterbatasan kewenangan dalam menentukan maupun mengubah data penerima bantuan sosial secara langsung. Pemerintah desa menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan sering menerima berbagai keluhan terkait bantuan sosial, tetapi keputusan akhir mengenai penetapan penerima bantuan tetap berada pada Dinas Sosial dan pemerintah pusat sebagai pengelola sistem data nasional.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui teori Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa struktur organisasi dan pembagian tugas dalam program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul telah berjalan sesuai fungsi masing-masing pelaksana. Akan tetapi, karakteristik badan pelaksana juga dipengaruhi oleh batasan kewenangan yang dimiliki setiap aktor dalam proses implementasi kebijakan. Kondisi ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengintegrasikan pengelolaan data kesejahteraan secara terpusat. Selain itu, Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 mengatur bahwa pemerintah desa dapat mengusulkan pemutakhiran data melalui Musyawarah Desa, tetapi keputusan akhir tetap berada pada pemerintah yang berwenang di tingkat atas. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Haliim & Purba, 2023) yang menunjukkan bahwa sistem data bantuan sosial yang terpusat membatasi ruang gerak pemerintah desa dalam merespons perubahan kondisi masyarakat secara langsung.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul telah didukung oleh struktur pelaksana yang memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Pemerintah desa, pendamping sosial, Dinas Sosial, dan pemerintah pusat telah menjalankan fungsi masing-masing sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Namun, keterbatasan kewenangan pemerintah desa dalam menetapkan maupun mengubah data penerima

bantuan sosial masih menjadi kendala dalam merespons kebutuhan masyarakat secara cepat.

Berdasarkan analisis tersebut, implementasi program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul pada indikator karakteristik badan pelaksana telah memenuhi aspek pembagian tugas dan struktur organisasi sebagaimana dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Akan tetapi, efektivitas pelaksanaan program masih dipengaruhi oleh terbatasnya kewenangan pemerintah desa dalam proses pengambilan keputusan terkait data penerima bantuan sosial.

Untuk mengatasi kondisi itu, pemerintah Desa Dawuhan Kidul perlu mengoptimalkan mekanisme usul dan sanggah serta pelaksanaan Musyawarah Desa sebagai sarana penyampaian kondisi riil masyarakat kepada pemerintah yang berwenang. Selain itu, koordinasi antara pemerintah desa, pendamping sosial, dan Dinas Sosial perlu terus diperkuat agar proses pemutakhiran data penerima bantuan sosial dapat berjalan lebih responsif terhadap perubahan kondisi masyarakat di lapangan.

4. Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian, aparat desa, operator pelayanan, dan pendamping sosial menunjukkan sikap yang cukup baik dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul. Masyarakat menilai para pelaksana bersikap ramah, mudah ditemui, serta bersedia memberikan penjelasan terkait bantuan sosial. Selain itu, pelaksana juga membantu masyarakat dalam proses pengecekan data, pemberian informasi mengenai bantuan sosial, serta pendampingan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Meskipun begitu, pelaksana masih menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan program. Pemerintah desa sering menerima keluhan masyarakat terkait ketidaktepatan sasaran dan keterlambatan pencairan bantuan, padahal kewenangan penentuan penerima maupun jadwal pencairan bantuan berada pada instansi yang lebih tinggi. Pendamping sosial juga menghadapi kesulitan ketika menemukan penerima bantuan yang kondisi ekonominya sudah membaik tetapi masih tercatat sebagai penerima manfaat.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa disposisi pelaksana dalam program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul pada dasarnya sudah berjalan dengan baik. Menurut Van Meter dan Van Horn, disposisi pelaksana berkaitan dengan komitmen, respons, dan penerimaan pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan. Komitmen tersebut terlihat dari upaya aparat desa dan pendamping sosial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat meskipun mereka menghadapi berbagai keterbatasan dalam pelaksanaan program. Kondisi ini juga berkaitan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 yang mengatur mekanisme pemutakhiran data dan penetapan penerima bantuan sosial. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa tidak memiliki kewenangan untuk secara langsung mengubah atau menetapkan status penerima bantuan, sehingga proses

perubahan data harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian (Ariyanto & Nain, 2024) yang menunjukkan bahwa komitmen pelaksana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan program bantuan sosial.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul pada indikator disposisi atau sikap pelaksana telah menunjukkan komitmen dan respons yang baik dari para pelaksana. Namun, efektivitas pelaksanaan program masih dipengaruhi oleh berbagai kendala yang berada di luar kewenangan pelaksana, terutama terkait pemutakhiran data dan penetapan penerima bantuan sosial.

Dengan demikian, implementasi program pengentasan kemiskinan pada indikator disposisi pelaksana telah memenuhi aspek komitmen dan respons pelaksana sebagaimana dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Akan tetapi, hasil yang dicapai belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala pada sistem data dan proses penetapan penerima bantuan sosial.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah desa bersama pendamping sosial perlu meningkatkan sosialisasi mengenai kriteria penerima bantuan sosial dan mekanisme graduasi kepesertaan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah desa perlu mengoptimalkan forum Musyawarah Desa sebagai sarana penyampaian informasi dan verifikasi kondisi masyarakat agar proses usulan maupun pembaruan data penerima bantuan sosial dapat berjalan lebih efektif.

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul telah dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi. Pada program PKH dan BPNT, penyampaian informasi dilakukan melalui pendamping sosial, grup WhatsApp, dan pertemuan rutin KPM. Sementara itu, pada bantuan pangan atau sembako, informasi disampaikan melalui pemerintah desa hingga tingkat RT. Selain komunikasi dengan masyarakat, koordinasi antarpelaksana juga dilakukan melalui rapat koordinasi dan komunikasi antara pemerintah desa, pendamping sosial, Dinas Sosial, serta instansi terkait lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa informasi program telah disalurkan melalui berbagai jalur komunikasi yang tersedia.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), komunikasi yang baik diperlukan agar tujuan, prosedur, dan informasi kebijakan dapat dipahami secara sama oleh seluruh pelaksana maupun kelompok sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi program pada dasarnya telah berjalan dengan cukup baik. Pendamping sosial secara rutin menyampaikan informasi kepada KPM melalui pertemuan kelompok dan media komunikasi digital, sedangkan pemerintah desa berperan sebagai penghubung informasi antara instansi pelaksana dan masyarakat. Akan tetapi, penelitian ini juga menemukan bahwa informasi mengenai jadwal pencairan bantuan sering kali belum dapat disampaikan secara pasti. Kondisi tersebut tidak hanya

dirasakan oleh KPM, tetapi juga oleh pemerintah desa dan pendamping sosial karena informasi pencairan bergantung pada pemberitahuan dari instansi yang lebih tinggi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hambatan komunikasi dalam pelaksanaan program tidak terletak pada proses penyampaian informasi, melainkan pada kepastian informasi yang diterima oleh pelaksana di tingkat bawah. Temuan ini sejalan dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagipakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menekankan pentingnya keterpaduan dan pemanfaatan data dalam penyelenggaraan program sosial. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Fanny & Megawati, 2022) yang menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi antarpelaksana menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi program bantuan sosial.

Berdasarkan temuan mengenai saluran komunikasi, kendala informasi, dan pola koordinasi antarinstansi, dapat disimpulkan bahwa implementasi program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul pada indikator komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksanaan telah berjalan cukup baik. Pelaksana program telah memanfaatkan berbagai media komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun demikian, efektivitas komunikasi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kepastian informasi mengenai jadwal pencairan bantuan serta pemahaman sebagian masyarakat terhadap mekanisme bantuan sosial berbasis digital.

Dengan demikian, implementasi program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul pada indikator komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksanaan telah memenuhi aspek komunikasi sebagaimana dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Akan tetapi, efektivitas komunikasi belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat hambatan pada arus informasi dari tingkat atas dan pemahaman masyarakat terhadap informasi program yang disampaikan.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, pemerintah desa perlu meningkatkan penyampaian informasi terkait perkembangan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses, seperti grup WhatsApp, papan informasi desa, dan koordinasi melalui RT. Langkah ini penting agar masyarakat memperoleh informasi terbaru mengenai proses penyaluran bantuan meskipun jadwal pencairan masih bergantung pada keputusan instansi yang lebih tinggi. Selain itu, pemerintah desa bersama pendamping sosial perlu memberikan pendampingan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi Cek Bansos, sehingga masyarakat dapat melakukan pengecekan status bantuan, usul, maupun sanggah data secara lebih mandiri.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik di Desa Dawuhan Kidul memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Dari aspek ekonomi, sebagian besar masyarakat bekerja sebagai buruh tani dan mengandalkan sektor pertanian yang bersifat musiman sehingga tingkat pendapatan yang diperoleh cenderung tidak menentu. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat masih bergantung pada bantuan sosial seperti PKH, BPNT,

dan bantuan pangan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Dari aspek sosial, peneliti menemukan adanya kecemburuan sosial di tengah masyarakat akibat perbedaan status penerima bantuan. Beberapa warga menilai bantuan sosial belum sepenuhnya tepat sasaran, terutama ketika terdapat penerima manfaat yang kondisi ekonominya dinilai telah membaik tetapi masih menerima bantuan sosial.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik memiliki pengaruh terhadap implementasi program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul. Menurut Van Meter dan Van Horn, lingkungan eksternal dapat menjadi faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, kondisi ekonomi masyarakat yang masih rentan menjadi faktor yang mendukung keberlangsungan program bantuan sosial karena masyarakat masih membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Namun, pada saat yang sama kondisi tersebut juga memunculkan kecemburuan sosial ketika masyarakat menilai terdapat ketidaksesuaian antara kondisi ekonomi penerima bantuan dengan data yang tercatat dalam sistem.

Kondisi tersebut berkaitan dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 79/HUK/2025 yang menetapkan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kategori desil sebagai dasar penentuan prioritas penerima bantuan sosial. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa sering menerima keluhan dari masyarakat terkait status penerima bantuan, meskipun kewenangan penetapan penerima manfaat berada pada sistem dan instansi yang berwenang di tingkat atas. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Sawitri & Rahmat, 2024) serta (Haliim & Purba, 2023) yang menunjukkan bahwa perbedaan persepsi masyarakat terhadap penentuan penerima bantuan dapat memunculkan ketegangan sosial dan memengaruhi pelaksanaan program di tingkat lokal.

Berdasarkan temuan mengenai kondisi ekonomi masyarakat, kecemburuan sosial, dan keterbatasan kewenangan pemerintah desa, dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial, ekonomi, dan politik di Desa Dawuhan Kidul memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap implementasi program pengentasan kemiskinan. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap bantuan sosial serta munculnya perbedaan persepsi mengenai penerima bantuan menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan program.

Dengan demikian, implementasi program pengentasan kemiskinan pada indikator lingkungan sosial, ekonomi, dan politik menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh ketepatan data penerima manfaat, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan. Oleh karena itu, dukungan lingkungan yang kondusif menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi program pengentasan kemiskinan.

Untuk mengurangi potensi kecemburuan sosial dan kesalahpahaman di masyarakat, pemerintah desa bersama pendamping sosial perlu meningkatkan transparansi informasi mengenai mekanisme penentuan penerima bantuan sosial melalui kegiatan sosialisasi dan Musyawarah Desa. Informasi mengenai kategori desil, kriteria penerima bantuan, serta mekanisme usul dan sanggah perlu disampaikan secara sederhana agar

mudah dipahami masyarakat. Selain itu, pemerintah desa perlu mengoptimalkan pemutakhiran data secara berkala melalui koordinasi dengan pendamping sosial dan masyarakat agar perubahan kondisi sosial ekonomi warga dapat segera diusulkan ke dalam sistem. Dengan demikian, ketepatan sasaran bantuan sosial dapat lebih terjaga dan potensi konflik sosial di tingkat masyarakat dapat diminimalkan.

Secara keseluruhan, implementasi program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul masih menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan kebijakan dengan kondisi yang ditemui di lapangan. Meskipun berbagai program bantuan sosial telah berjalan, beberapa persoalan seperti ketidaktepatan sasaran, keterlambatan informasi, keterbatasan pemutakhiran data, serta munculnya kecemburuan sosial masih ditemukan dalam pelaksanaannya. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme usul-sanggah data maupun pemanfaatan instrumen bantuan yang menjadi kewenangan desa belum dimanfaatkan secara optimal karena proses administrasi yang dianggap cukup panjang dan harus melalui tahapan verifikasi berjenjang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan bantuan sosial, tetapi juga oleh kualitas data, koordinasi antar pelaksana, serta inisiatif pelaksana dalam memanfaatkan ruang kewenangan yang tersedia untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul Kabupaten Kediri menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, dapat disimpulkan bahwa program pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan pangan, PBI-JK, dan bantuan sosial lainnya telah memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, khususnya kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Pelaksanaan program juga didukung oleh adanya standar dan sasaran yang jelas, keterlibatan berbagai aktor pelaksana, ketersediaan sarana pendukung, serta komunikasi yang dilakukan antara pemerintah desa, pendamping sosial, dan masyarakat.

Meskipun demikian, implementasi program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul masih menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan kebijakan dengan kondisi yang ditemui di lapangan. Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, keterlambatan dan ketidakpastian informasi penyaluran bantuan, keterbatasan pemutakhiran data, serta munculnya kecemburuan sosial di masyarakat. Selain itu, kewenangan pemerintah desa dalam penentuan penerima bantuan masih terbatas sehingga berbagai keluhan masyarakat tidak dapat diselesaikan secara langsung di tingkat desa. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mekanisme usul-sanggah data maupun pemanfaatan instrumen bantuan yang menjadi ruang kewenangan pemerintah desa belum berjalan secara optimal karena adanya proses administrasi dan verifikasi yang cukup panjang.

Secara keseluruhan, implementasi program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul telah membantu mengurangi beban ekonomi masyarakat penerima manfaat, namun pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan pada aspek akurasi data, pemutakhiran data penerima manfaat, koordinasi antar pelaksana, serta pemanfaatan kewenangan yang dimiliki pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan program. Dengan adanya perbaikan pada aspek-aspek tersebut, program pengentasan kemiskinan diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi disusun sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul. Rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah desa perlu meningkatkan penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme bantuan sosial, terutama terkait proses pengecekan, pengusulan, dan sanggahan data melalui aplikasi Cek Bansos. Informasi tersebut dapat disampaikan melalui pertemuan warga, kegiatan desa, maupun melalui RT dan kepala dusun.

2. Pemerintah desa bersama pendamping sosial perlu mengoptimalkan pemutakhiran data penerima bantuan secara berkala melalui mekanisme usul dan sanggah agar data yang digunakan lebih sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
3. Pemerintah desa dan pendamping sosial perlu memberikan pendampingan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses layanan digital, khususnya lansia dan masyarakat yang belum terbiasa menggunakan aplikasi Cek Bansos.
4. Pendamping sosial perlu memperkuat pembinaan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta mendorong peningkatan kemandirian ekonomi penerima manfaat agar ketergantungan terhadap bantuan sosial dapat berkurang secara bertahap.
5. Pendamping sosial perlu mengoptimalkan proses graduasi bagi KPM yang kondisi ekonominya telah membaik agar bantuan sosial dapat diberikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.
6. Masyarakat diharapkan memahami bahwa penetapan penerima bantuan sosial dilakukan berdasarkan mekanisme dan data yang berlaku, sehingga proses penyaluran bantuan tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah desa.

Dengan adanya upaya perbaikan tersebut, diharapkan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Desa Dawuhan Kidul dapat berjalan lebih tepat sasaran, responsif terhadap kondisi masyarakat, serta mampu memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat penerima bantuan penyaluran bantuan tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah desa.

ermai dwi

ORIGINALITY REPORT

13%	10%	9%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Ulya Sabina Putri, Artha Dini Akmal. "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Lubuk Begalung Kelurahan Gurun Laweh Nan XX: Tinjauan terhadap Efektivitas Pendataan dan Ketepatan Sasaran", YASIN, 2026 Publication	1%
2	Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper	<1%
3	journal.appisi.or.id Internet Source	<1%
4	dinsosnusatenggaratimur.id Internet Source	<1%
5	ejournal.unitomo.ac.id Internet Source	<1%
6	journal.student.uny.ac.id Internet Source	<1%
7	Submitted to Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Student Paper	<1%
8	infogururentals.blogspot.com Internet Source	<1%
9	dinsosstabat.id Internet Source	<1%
10	ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id Internet Source	<1%
	Submitted to IAIN Purwokerto	

11	Student Paper	<1 %
12	www.kalamanthana.id Internet Source	<1 %
13	M. Riadul Minan, Baiq Ratna Mulhimmah, Zulpawati Zulpawati. "Dinamika Peran Perempuan Buruh Tani dalam Mempertahankan Stabiitas Ekonomi Rumah Tangga", JURNAL PENDIDIKAN IPS, 2025 Publication	<1 %
14	adoc.pub Internet Source	<1 %
15	banyumasekspres.id Internet Source	<1 %
16	Submitted to Fakultas ISIP Student Paper	<1 %
17	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
18	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
19	peraturan.bpk.go.id Internet Source	<1 %
20	Submitted to Universitas Terbuka Student Paper	<1 %
21	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
22	jateng.tribunnews.com Internet Source	<1 %
23	dinsosjawabarat.id Internet Source	<1 %
24	sasanti.or.id Internet Source	<1 %

25	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
26	www.asatunews.co.id Internet Source	<1 %
27	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
28	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
29	repo.undiksha.ac.id Internet Source	<1 %
30	www.scribd.com Internet Source	<1 %
31	ojs.uma.ac.id Internet Source	<1 %
32	Kusman Yuhana. "Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Dan Gizi di Kabupaten Subang", ijd-demos, 2020 Publication	<1 %
33	Submitted to LPPM Student Paper	<1 %
34	Aziza Nabela, Nini Sumarni. "Persepsi Masyarakat Mengenai Keterbukaan Informasi Aparatur Kelurahan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tarok Dipo Kota Bukittinggi", ARZUSIN, 2026 Publication	<1 %
35	Putri Wulandari, Laily Ratna, Uswatun Hasanah. "Wanprestasi yang Dilakukan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Talang Belitar", Al-DYAS, 2026 Publication	<1 %

36	villages.pubmedia.id Internet Source	<1 %
37	data.go.id Internet Source	<1 %
38	profilpelajar.com Internet Source	<1 %
39	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1 %
40	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	<1 %
41	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
42	eriesadewo.blogspot.com Internet Source	<1 %
43	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
44	jurnal.unived.ac.id Internet Source	<1 %
45	penerbitadm.pubmedia.id Internet Source	<1 %
46	picgarut.id Internet Source	<1 %
47	www.docstoc.com Internet Source	<1 %
48	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	<1 %
49	es.scribd.com Internet Source	<1 %
50	polsekmandau.com Internet Source	<1 %

51	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
52	Janeska Widia. "Dilema Etis dalam Formulasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan: Pendekatan Normatif terhadap Prinsip Kesetaraan dan Pemberdayaan", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2025 Publication	<1 %
53	Taman Firdaus, Rafiuddin Rafiuddin, Mukrabin Mukrabin. "Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Oi Tui Pada Masa Pandemi Covid-19 di Tinjau Dari Perspektif", J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah), 2021 Publication	<1 %
54	arpusda.semarangkota.go.id Internet Source	<1 %
55	bams.blog Internet Source	<1 %
56	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
57	123dok.com Internet Source	<1 %
58	Submitted to KOMBI FISIP Student Paper	<1 %
59	journal.unita.ac.id Internet Source	<1 %
60	www.fajarsumbar.com Internet Source	<1 %
61	Adawiyah Pettalongi, Hasriani, Moh. Israwan N. Samani. "IMPLEMENTASI PROGRAM	<1 %

	PEMENTASAN KEMISKINAN DI DESA LOLI OGE KECAMATAN BANAWA KAB. DONGGALA", Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, 2021 Publication	
62	Submitted to Universitas Mulawarman Student Paper	<1 %
63	aplikasi.tubaba.go.id Internet Source	<1 %
64	bidiknews.co.id Internet Source	<1 %
65	ejournal.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1 %
66	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	<1 %
67	kompas86.com Internet Source	<1 %
68	palangkanews.co.id Internet Source	<1 %
69	www.cnnindonesia.com Internet Source	<1 %
70	Jessica Aprileony Tanjung, Rahmadini Puja, Dila Erlianti. "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia: Studi Literatur", Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 2026 Publication	<1 %
71	Naila Falichatul Muannisa, Wahyu Sulistiadi. "Analisis Implementasi Program Active Case Finding Tuberkulosis di Puskesmas Kebayoran Baru dengan Pendekatan Teori Van Meter Van Horn", Jurnal Ners, 2025 Publication	<1 %

72	Submitted to Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
73	Submitted to Universitas Maritim Raja Ali Haji Student Paper	<1 %
74	Submitted to Universitas Pertahanan RI Student Paper	<1 %
75	aceh.tribunnews.com Internet Source	<1 %
76	journals.unihaz.ac.id Internet Source	<1 %
77	ukmindonesia.id Internet Source	<1 %
78	www.infobima.com Internet Source	<1 %
79	Dian Astuti. "Stagging Kebijakan Pengentasan Kemiskinan dalam Membangun Resiliensi Mayarakat Menuju Sulawesi Tengah Nambaso", Jurnal Pendidikan Tambusai, 2026 Publication	<1 %
80	Wenny Agustina, Ayi Najmul Hidayat, Sobari Sobari. "Transformasi Digital Administrasi Kesiswaan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan (Studi Kualitatif di MTs Ar Ruhaniyyah Cikampek)", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %
81	indojurnal.com Internet Source	<1 %
82	journal.tofedu.or.id Internet Source	<1 %
83	mulok.library.um.ac.id	

	Internet Source	<1%
84	www.coursehero.com Internet Source	<1%
85	Dimas Muhamad Irvan, Narrudin Irvan Syahri. "PeranLayananSosialTerintegrasidalamMeningkatkan KesejahteraanPenerimaManfaat di KecamatanBintanUtara", MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2026 Publication	<1%
86	anggaran.kemenkeu.go.id Internet Source	<1%
87	docplayer.info Internet Source	<1%
88	ejournal.unsub.ac.id Internet Source	<1%
89	jdih.setkab.go.id Internet Source	<1%
90	jurnal.stain-madina.ac.id Internet Source	<1%
91	pdfcoffee.com Internet Source	<1%
92	Armi Mahtadea Mufti, Desna Aromatica, Nila Wahyuni. "Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi", Journal of Administration, Governance, and Political Issues, 2025 Publication	<1%
93	Chamid Sutikno, Muhammad Yusuf. "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kotayasa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas", Sawala : Jurnal Administrasi Negara, 2023	<1%

	Publication	
94	Nadya Tiara. "The Politics Of Equitable Citizen Rights (Data Collection Studi On The Distribution Of Cash Social Assistance Programs During The Covid-19 Pandemic In Pangkalpinang City In 2020)", Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2024 Publication	<1 %
95	S.M. Riziq Almahdhar, Muhammad Farrel Rafangga, Andi Ariq Akhdan Ziyad, Dian Fitriani Afifah. "OPTIMALISASI OTONOMI DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN: ANALISIS STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DALAM MEWUJUDKAN SDGS NO POVERTY", Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 2025 Publication	<1 %
96	iuwashtangguh.or.id Internet Source	<1 %
97	journal.iteba.ac.id Internet Source	<1 %
98	koran-jakarta.com Internet Source	<1 %
99	ojs.uho.ac.id Internet Source	<1 %
100	pascasarjanaikj.ac.id Internet Source	<1 %
101	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
102	repository.uinfasbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
103	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1 %

104	repository.unas.ac.id Internet Source	<1 %
105	www.kundurnews.co.id Internet Source	<1 %
106	Submitted to Abdullah Gul University Student Paper	<1 %
107	Amarandita Puspa Rossa, Ishak Kusnandar, Dian Herlina. "Implementasi Kebijakan Tata Kearsipan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tasikmalaya", Jurnal Pendidikan Tambusai, 2026 Publication	<1 %
108	Asrin Asrin. "Evaluasi Kebijakan BPNT Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Pada Keluarga Miskin di Kelurahan Baadia Kota Baubau", Journal of Government Science Studies, 2022 Publication	<1 %
109	Marlina Marlina, Nurwasya Nurwasya, Devi Valeriani, Ayu Wulandari. "Korelasi Umur, Penghasilan Tetap, Pendidikan Terakhir dan Rata-Rata Pengeluaran Pada Rumah Tangga Miskin di Kota Pangkalpinang", Equity: Jurnal Ekonomi, 2022 Publication	<1 %
110	Muhammad Heru Akhmadi, Nurul Khilyati, Erlita Nurma Wati. "Dampak Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan Terhadap Kemandirian Rumah Tangga Di Desa Plosojenar 2016-2022", Jurnal Ecodemica : Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, 2023 Publication	<1 %
111	Muhammad Rafly Rafsanjani, Syadeli Hanafi, Ahmad Fauzi. "Efektivitas Program Dana	<1 %

	Bantuan Tunai PKH dalam Upaya Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat di Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang", MASALIQ, 2025 Publication	
112	Ni Made Oveta Annisya, Alikha Novira. "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam", Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik, 2023 Publication	<1 %
113	Risa Megariska, Hendra Sukmana. "Implementasi Program Pengelolaan Bank Sampah Di Desa Larangan Kecamatan Candi", Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat, 2022 Publication	<1 %
114	Siti Ariningsih. "Implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kendal", Economic Military and Geographically Business Review, 2024 Publication	<1 %
115	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
116	desakarangbendo.id Internet Source	<1 %
117	desanaob.id Internet Source	<1 %
118	e-journals.unmul.ac.id Internet Source	<1 %
119	eco.ojs.co.id Internet Source	<1 %

120	ejournal-polnam.ac.id Internet Source	<1 %
121	eprints.ipdn.ac.id Internet Source	<1 %
122	eprints.pancabudi.ac.id Internet Source	<1 %
123	eprints.unimudasorong.ac.id Internet Source	<1 %
124	epub.imandiri.id Internet Source	<1 %
125	id.scribd.com Internet Source	<1 %
126	infopublik.id Internet Source	<1 %
127	journal.lppm-unasman.ac.id Internet Source	<1 %
128	journal.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
129	journal.yrpipku.com Internet Source	<1 %
130	jurnalpolitik.ui.ac.id Internet Source	<1 %
131	media.neliti.com Internet Source	<1 %
132	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	<1 %
133	repository.uki.ac.id Internet Source	<1 %
134	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
	syahriartato.wordpress.com	

135	Internet Source	<1%
136	timesmaluku.com Internet Source	<1%
137	www.bangkalankab.go.id Internet Source	<1%
138	www.stkipbima.ac.id Internet Source	<1%
139	"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN DI ERA COVID - 19", Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 2023 Publication	<1%
140	Priscillia Heumasse, Josef Papilaya, William George M Louhenapessy. "Analysis of Community Perceptions on the Family Hope Program in Waiheru Village, RT 014/RW 004", JENDELA PENGETAHUAN, 2025 Publication	<1%
141	Algie Rizky Fadillah, Achmad Kamalul Kafi, Michael Joseph Shernahto, Dian Fitriani Afifah. "STUDI IMPLEMENTASI SDGS NO POVERTY PADA PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT: EFEKTIVITAS PROGRAM SOSIAL DAERAH DALAM MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN", Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 2025 Publication	<1%
142	Arisa Adiyanti, Harjanti Agustina Eka, Risnawati Heni. "Analisis Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan", Solusi, 2025 Publication	<1%

143	Nuralif Nanda Yulita, Syafrudin Arif Marah Manunggal. "Pengaruh Pendapatan, Pinjaman, Literasi Ekonomi, dan Gaya Hidup terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Desa Mojosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2023 Publication	<1 %
144	Syamsu J. "Analisis Kebijakan Bantuan Sosial terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Digital Kabupaten Sijunjung", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2025 Publication	<1 %

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	Off		